

No. : KP. 160/BR.KTO/IV/2024
Tanggal : 30 April 2024
Lamp. : 1 (satu) berkas.

Kantor Pusat :

Jl. Kartini, By Pass, Klaten

Telp : (0272) 329211
0815 7500 400

Email : bprbhaktiriyadi@gmail.com

Web : bprbhaktiriyadi.com

Kepada Yth.

Kepala Kantor Perwakilan

Otoritas Jasa Keuangan Solo

Jl. Slamet Riyadi No.328, Sriwedari

Laweyan, Solo

Perihal : **Penyampaian Laporan Tahunan PT BPR Bhakti Riyadi**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.39/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Bhakti Riyadi Tahun 2023,
2. Salinan Laporan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan PT BPR Bhakti Riyadi Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 **PT. Bank Perkreditan Rakyat
Bhakti Riyadi**



Anggoro Mahendra Setyawan

Direktur Utama



Daftar Isi		1
Bab I	Pendahuluan	2
Bab II	Informasi Umum	4
Bab III	Laporan Perkembangan Usaha	15
Bab IV	Laporan Keuangan	41
Bab V	Laporan Manajemen	51
Bab VI	Kebijakan dan Strategi Perusahaan	66
Bab VII	Penutup	79

Lampiran

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN 2023
PT. BPR BHAKTI RIYADI**

BAB I
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Tahunan bagi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bhakti Riyadi merupakan dokumen pelaporan formal untuk kalangan terbatas yang memberikan gambaran faktual tentang kinerja Perusahaan. Karena itu, sistematika dan materi yang disajikan juga relatif lebih dimaksudkan untuk mengikuti pola sistematika yang telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat. Secara konten, materi dan data pada laporan ini lebih difokuskan pada pelaporan kinerja Perusahaan dalam aspek kinerja keuangan. Data laporan keuangan tahun 2023 yang disajikan pada bab tersendiri merupakan data-data hasil audit oleh Akuntan Publik (AP) M. Yudhika Elrifi. M.Sc.Ak.CA.BKP.CPA.CFrA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto Dan Yudhika. Selain data kinerja keuangan, pada beberapa bab sebelumnya disajikan pula gambaran umum Perusahaan, beberapa pencapaian kinerja kualitatif seperti program-program pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebijakan strategis tentang pengembangan pasar dan jaringan.

Pada tahun 2023 ekonomi mengalami penurunan dikarenakan melambatnya konsumsi rumah tangga terutama disebabkan melemahnya (tertundanya) daya beli kelas menengah ke atas, serta relatif terbatasnya kenaikan konsumsi segmen berpenghasilan rendah di tengah kenaikan belanja sosial dan politik menjelang pemilihan umum (pemilu), Perlambatan investasi. Investasi mesin dan peralatan serta kendaraan bermotor mengalami perlambatan seiring melemahnya ekspor dan investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI), sementara investasi bangunan dan infrastruktur relatif bertahan didukung belanja modal pemerintah, Melambatnya kinerja ekspor-impor.

PT BPR Bhakti Riyadi menjadikan hal tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk tetap mempertahankan keberlanjutan Bank. Penyusunan strategi yang baik dan tepat sasaran serta diimbangi dengan pengawasan melekat yang berkesinambungan, menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Bank dalam menjalankan bisnis ke depan yang mampu mencapai target bisnis yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala melakukan evaluasi kinerja berkaitan dengan pencapaian RBB untuk menilai sejauh mana hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah dicanangkan serta pertumbuhannya dibandingkan dengan kinerja bulan maupun tahun sebelumnya. Selain itu, secara konsisten dan berkesinambungan juga dilakukan pemantauan praktik bisnis dan kepatuhan PT BPR Bhakti Riyadi dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang meliputi aspek akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian.

Segala pencapaian kinerja yang telah berhasil dicapai di tahun 2023 tersebut selayaknya dijadikan pijakan untuk menggapai kemajuan yang lebih baik di masa depan. Segenap jajaran manajemen dan pegawai kini mencanangkan tekad bulat untuk menjadikan PT BPR Bhakti Riyadi tidak saja sebagai salah satu BPR terkemuka di Kabupaten Klaten, namun juga sebagai salah satu BPR unggul dan terbaik. Tekad ini terasa menemukan momentumnya karena didukung komitmen seluruh jajaran di PT BPR Bhakti Riyadi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, peningkatan kualitas SDM dan mendorong semakin kondusifnya jaringan serta daya dukung infrastruktur dan fasilitas pelayanan.



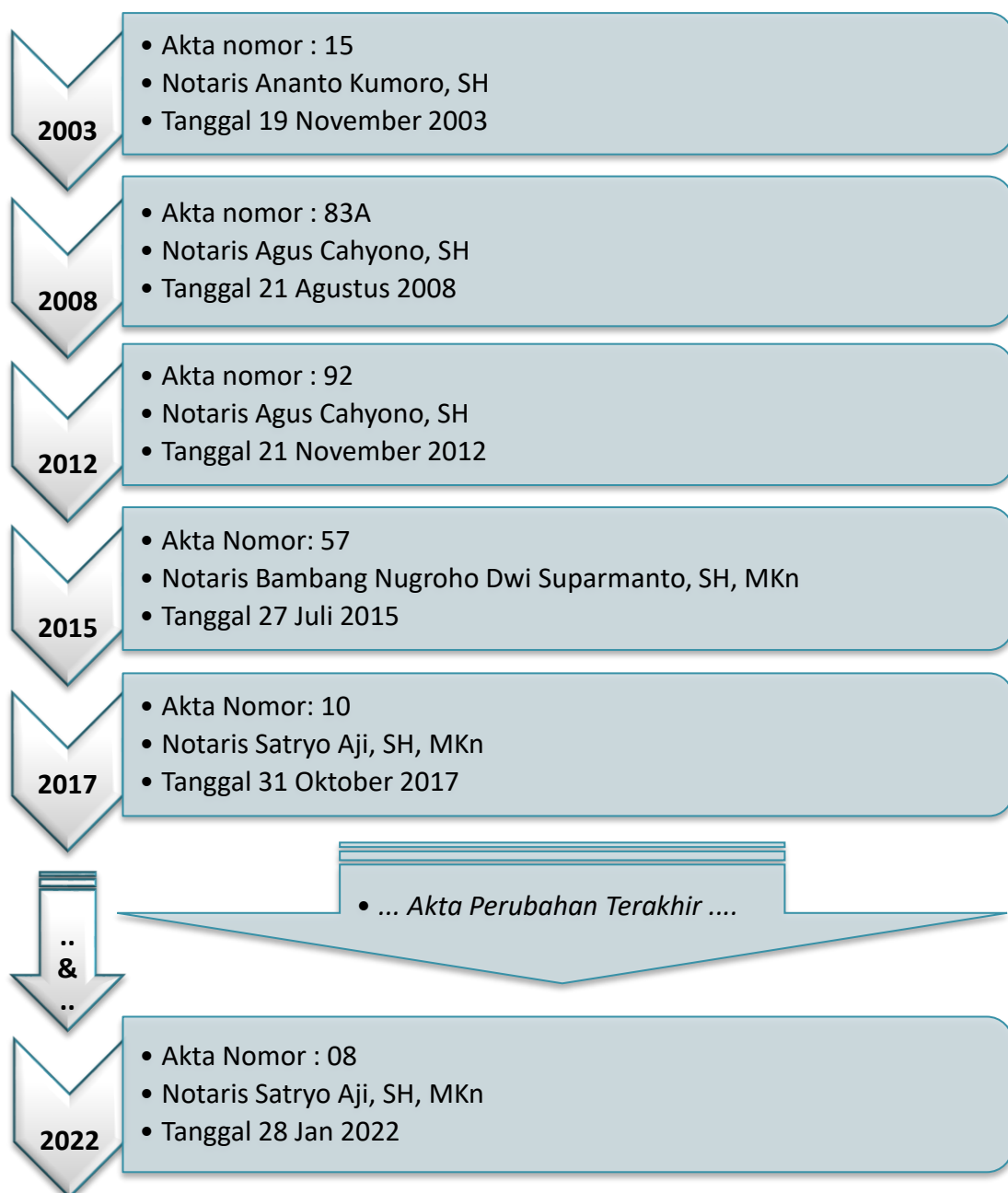
BAB II

INFORMASI UMUM

1. Riwayat Pendirian Perseroan

PT BPR Bhakti Riyadi Riyadi didirikan di Klaten, Jawa Tengah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 11 Februari 1995, yang dibuat dihadapan Mochamad Imron, Sarjana Hukum, Notaris di Klaten, dan Akta Perubahan Nomor 24 tanggal 10 Juli 1995 serta Akta Perubahan Nomor 51 tanggal 28 November 1995 oleh Notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : C2-16281 HT.01.01.TH.95 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1995 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 16 Maret 2004 No. 2750.

Selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya sebagai berikut :

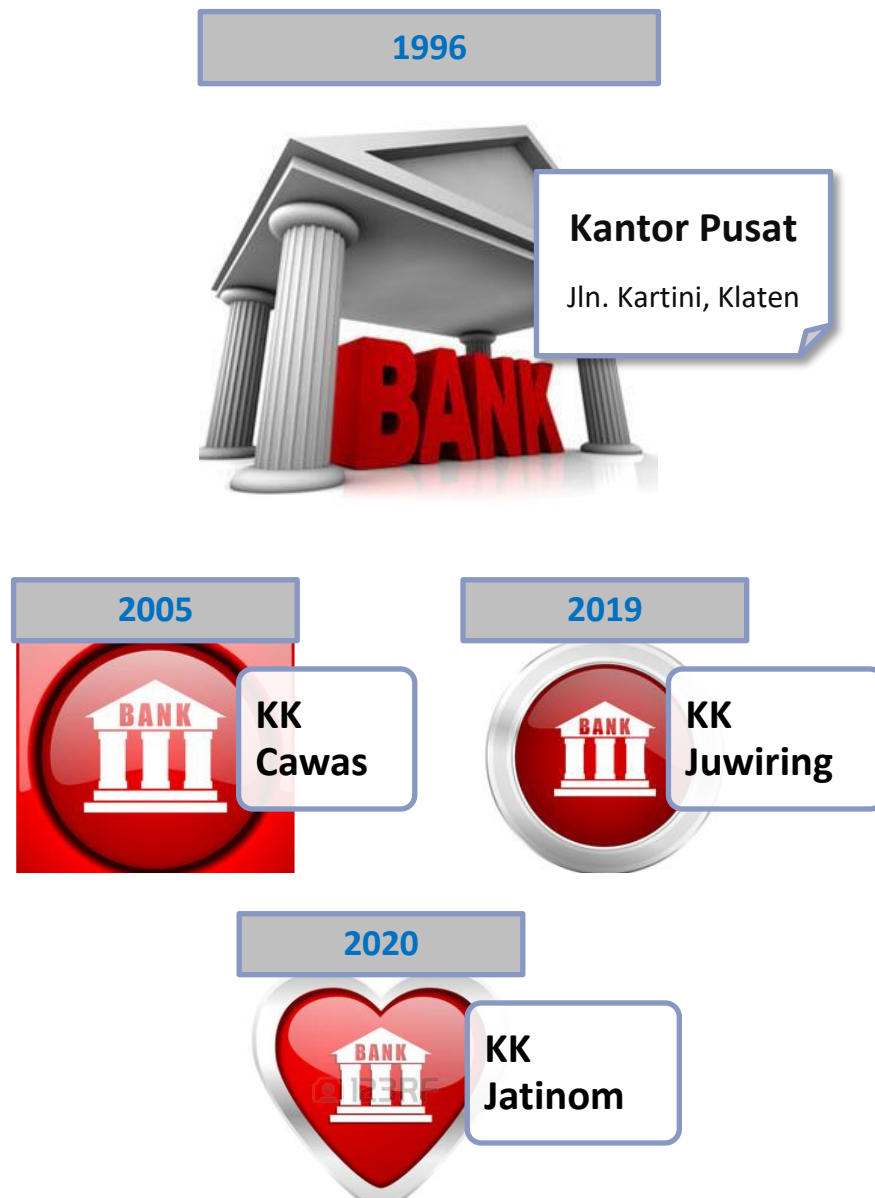


Perubahan terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Satryo Aji, S.H., M.Kn, Notaris di Klaten, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2022, Nomor AHU-AH.01.03-0068549 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0021130.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022.

2. Tempat Kedudukan

PT. BPR Bhakti mulai beroperasi pada tanggal 13 September 1996 yang berlokasi di Jl. Raya Selatan No. 23, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Terhitung sejak pertengahan tahun 2006, Kantor Pusat PT BPR Bhakti Riyadi telah berpindah lokasi di Jl. Kartini (By Pass), Kelurahan Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

Hingga akhir Desember 2023, jaringan kantor PT BPR Bhakti Riyadi terdiri dari :



3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan;
- b. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan;
- c. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan tabungan dana bank lain;
- d. Membeli melalui Pelelangan Agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya pada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan semuanya.

4. Perijinan Usaha

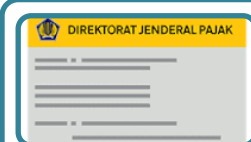
Dalam melaksanakan operasi usahanya, PT BPR Bhakti Riyadi memiliki perijinan sebagai berikut :



Izin Usaha dari Menteri Keuangan atas nama PT. BPR Bhakti Riyadi Nomor : Kep.252/KM.17/1996 tanggal 8 Juli 1996



Nomor Induk Berusaha : 9120103711024 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten tertanggal 12 Juli 2019



Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 001.545.834.2-525.000; dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten



Surat Ijin Gangguan dari Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor : 503.1/329/DU/2014 tanggal 2 Juni 2014

5. Susunan dan Profil Dewan Komisaris

Selama periode tahun 2023 tidak terjadi perubahan susunan dan komposisi kepengurusan Perusahaan. Secara kuantitatif dan personel masih sama dengan komposisi periode sebelumnya, yaitu jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang. Soliditas terus berusaha dijaga, tercermin dalam peran aktif Dewan Komisaris dalam memberikan fungsi pengawasan dan penasehat atas kinerja Direksi dalam menjalankan pengelolaan Bank sehingga kinerja Bank dapat tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*).

Profil Dewan Komisaris

K
O
M
I
S
A
R
I
S

U
T
A
M
A*Data Diri***Syamsul Ma'arif**

- TTL : Trenggalek, 03 April 1962
- Alamat : Dadimulyo Blok C Rt 003/005 Gergunung, Klaten Utara, Klaten.

*Riwayat Pendidikan*

- 1975 : MWB Trenggalek
- 1978 : SMP Al Islam Trenggalek
- 1981 : SMPP Negeri Trenggalek
- 1986 : S1 UNS Solo
- 2005 : Certif Komisaris BPR

*Riwayat Pekerjaan*

- 2002 - 2005 : Komisaris Utama BPR Nusumma Durenan Jatim
- 2008 - 2016 : Direktur Utama BPR Nusumma Jateng, Tegal
- 2017 - Skrg : Komisaris Utama PT BPR Bhakti Riyadi

*Data Diri***Setya Jati Kusuma**

- TTL : Semarang, 3 Juli 1974
- Alamat : Karang Sari, Wedomartani, RT 001/031, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman

*Riwayat Pendidikan*

- 1986 : SD N Bareng Lor III - Klaten
- 1989 : SMP N 4 - Klaten
- 1992 : SMA N 1 - Klaten
- 1998 : S1 UNS - Solo
- 2010 : Certif Komisaris BPR

*Riwayat Pekerjaan*

- 1998 – 2009 : Direktur Tikara Mebel
- 2001 – 2010 : Pemilik Swalayan Alya
- 2011 – skrg : Pemilik Dian Pelangi Yogya & Solo
- 2009 – skrg : Komisaris PT BPR Bhakti Riyadi

6. Susunan dan Profil Direksi

Pada tahun 2023 tidak terjadi perubahan komposisi Direksi Perusahaan dimana secara kuantitatif dan personel masih sama dengan komposisi tahun sebelumnya. Jumlah Anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang, termasuk dengan Direktur Utama. Soliditas yang terus berusaha dijaga, tercermin dalam peran aktif setiap Anggota Direksi dalam memberikan fungsi pengelolaan Bank.

Dengan komitmen kuat, Direksi memimpin dan mengawal seluruh jajaran manajemen di bawahnya untuk bekerja keras dalam mengimplementasikan seluruh Rencana Bisnis Bank. Pencapaian yang lebih besar dan lebih bernilai akan menjadi sasaran utama sekaligus komitmen kami kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Profil Direksi

D
I
R
E
K
T
U
R

U
T
A
M
A



Data Diri

Anggoro Mahendra Setyawan

- TTL : Jakarta, 7 Agustus 1979
- Alamat : Girimulyo, Blok A/XVI No.26, Kel. Gergunung, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten



Riwayat Pendidikan

- 1991 : SD N Sokanegara I - Purwokerto
- 1994 : SMP N 1 - Purwokerto
- 1997 : SMA N 1 - Klaten
- 2003 : S1 UGM - Jogjakarta
- 2005 : S2 UGM - Jogjakarta
- 2013 : Certif Direktur BPR



Riwayat Pekerjaan

- 2005 – 2011 : Pegawai PT Bank Mandiri
- 2012 – 2013 : Pegawai PT BPR Bhakti Riyadi
- 2014 – 2015 : Direktur PT BPR Bhakti Riyadi
- 2015 – skrg : Direktur Utama PT BPR Bhakti Riyadi

Laporan Keuangan Tahunan 2023– PT BPR Bhakti Riyadi

8

D
I
R
E
K
T
U
R



Data Diri

Sumanto

- TTL : Sukoharjo, 23 Januari 1970
- Alamat : Brumbung, RT 03/02, Kel. Dukuh, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo



Riwayat Pendidikan

- 1983 : SD N Dukuh 3 - Sukoharjo
- 1986 : SMP Taman Siswa - Sukoharjo
- 1989 : SMA Muhammadiyah 1 - Sukoharjo
- 1993 : D III AUB - Surakarta
- 2003 : S1 STIE Wijaya Mulya- Surakarta
- 2008 : Certif



Riwayat Pekerjaan

- 1997 – 1999 : Pegawai PT BPR Dana Setya
- 2000 – 2008 : Direktur PT BPR Dana Setya
- 2008 – 2009 : Direktur PT BPR Suryamas
- 2009 – 2015 : Direktur Utama PT BPR Suryamas
- 2015 – skrg : Direktur ymf Kepatuhan PT BPR Bhakti Riyadi

7. Profil Pejabat Eksekutif

P
E
R
S
I
K
E
P
A
T
U
H
A
N



Data Diri

Yupi Andini

- TTL : Klaten, 28 November 1995
- Alamat : Jayan RT.002/003, Pondok, Karanganom, Klaten



Riwayat Pendidikan

- 2001 : SD N 1 Ngaran - Klaten
- 2007 : SMP N 1 Polanharjo - Klaten
- 2010 : SMAN 1 Polanharjo - Klaten
- 2013 : S1 UGJ - Cirebon



Riwayat Pekerjaan

- 2017 - 2020 : Staff Teller PT BPR Bhakti Riyadi
- 2020-2022 : Staff Admin Kredit PT BPR Bhakti Riyadi
- 2022-2023 : Kasubag Adm & IT PT BPR Bhakti Riyadi
- 2023 - skrg : PE Kepatuhan, Manrisk, APU PPT PPPSPM dan SDM

Laporan Keuangan Tahunan 2023- PT BPR Bhakti Riyadi

9



Data Diri

Sri Wahyuni

- TTL : Klaten, 21 Januari 1975
- Alamat : Plosoarum, RT 01/05, Kel. Sekarsuli, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten



Riwayat Pendidikan

- 1986 : SDN II Trucuk - Klaten
- 1989 : SMP Pancasila - Klaten
- 1992 : SMAN 2 - Klaten
- 1997 : S1 Univ. Janabadra - Jogjakarta



Riwayat Pekerjaan

- 1999 – 2001 : Pegawai PNPM
- 2003 – 2015 : Pegawai PT BPR Bhakti Riyadi
- 2015 – skrg : Kabag. Keuangan, Teknologi Informasi & Ops PT BPR Bhakti Riyadi



Data Diri

Pertiwi Dwi Ningsih

- TTL : Klaten, 18 Juni 1977
- Alamat : Kradenan Rt 01/01 Kel Sawahan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten



Riwayat Pendidikan

- 1989 : SDN Sawahan - Klaten
- 1992 : SMPN 2 Juwiring - Klaten
- 1995 : SMEA N Delanggu - Klaten
- 2001 : S1 Univ. Tunas Pembangunan - Surakarta



Riwayat Pekerjaan

- 2011 – 2017 : Pegawai PT BPR Bhakti Riyadi
- 2017 – 2019 : Leader Area PT BPR Bhakti Riyadi
- 2019 - 2020 : Kasi Analis Kredit PT BPR Bhakti Riyadi
- 2020 - 2021 : Kasubag Analis dan Supervisi Kredit PT BPR Bhakti Riyadi
- 2021 - skrg : Kabag. Pengembangan & Supervisi Bisnis

8. Permodalan dan Kepemilikan

1995

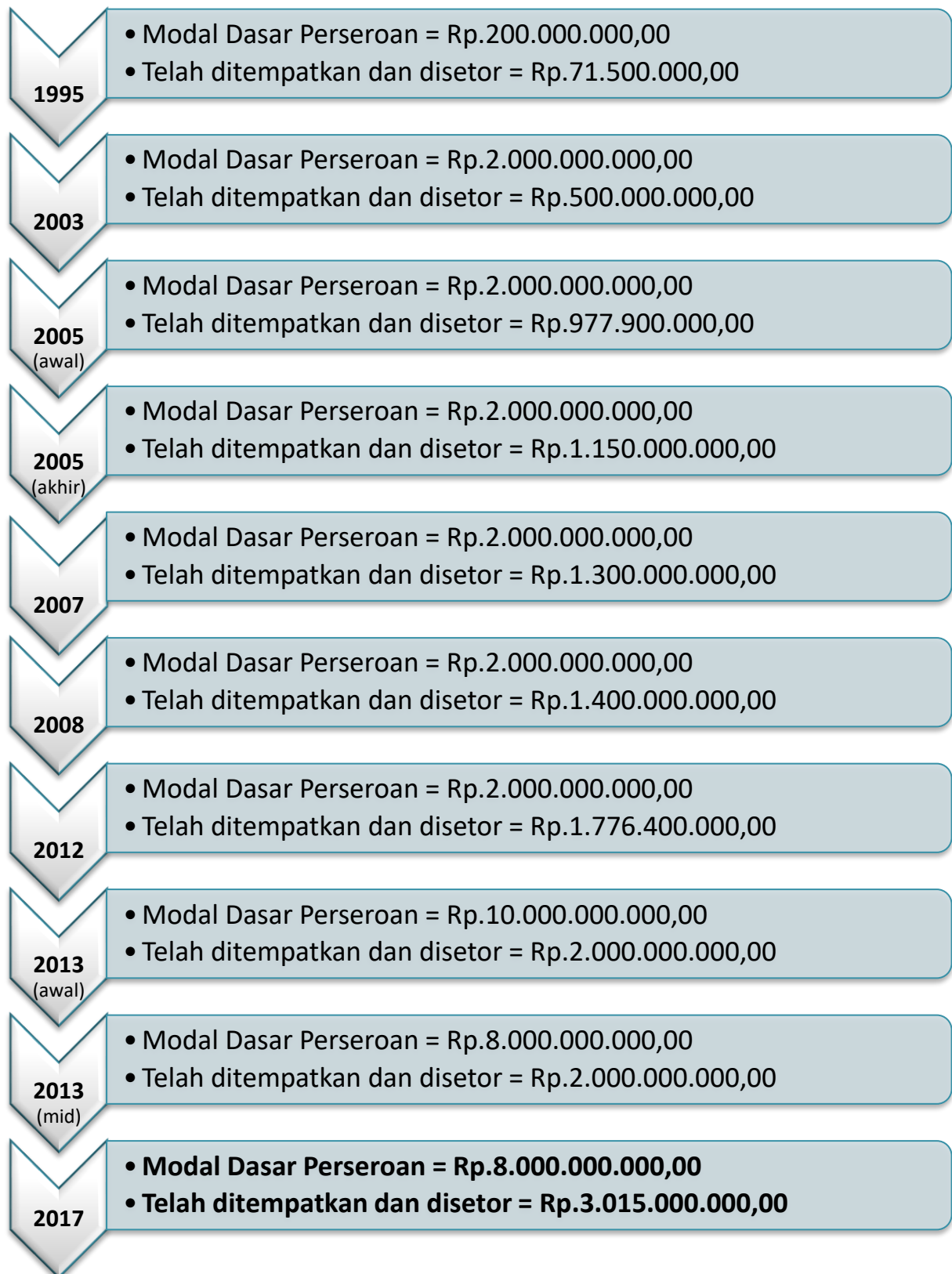


Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 18 tanggal 11 Februari 1995 disepakati bahwa Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,00 yang terbagi atas 2.000 lembar saham dengan nilai nominal masing – masing sebesar Rp.100.000,00. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sebesar Rp. 71.500.000,00

Komposisi modal yang ditempatkan oleh para pemegang saham pada saat itu adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Jumlah		
		Lembar	Nominal	%
1	Ny. Emy Damayanti. R	155	Rp. 15.500.000,-	21,68
2	Tn. Setya Jati Kusuma	155	Rp. 15.500.000,-	21,68
3	Tn. August Deva. W	150	Rp. 15.000.000,-	20,98
4	Tn. Drs. Soewandi	105	Rp. 10.500.000,-	14,69
5	Tn. Anggito	50	Rp. 5.000.000,-	6,99
6	Tn. Hermawan Budi S	20	Rp. 2.000.000,-	2,80
7	Tn. Yayang Damar W	20	Rp. 2.000.000,-	2,80
8	Tn. Bagus Prihartanto	20	Rp. 2.000.000,-	2,80
9	Ny. Indrawati Hartono	20	Rp. 2.000.000,-	2,80
10	Ny. H. Sriwarni H	10	Rp. 1.000.000,-	1,40
11	Tn. Drs. Haenis Gunarto	10	Rp. 1.000.000,-	1,40
Total		715	Rp. 71.500.000,-	100,00

Sejak pendirian sampai dengan saat ini, permodalan Perseroan mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :



2022



Hingga saat ini Modal Dasar Perseroan tetap sebesar Rp.8.000.000.000,00 terbagi atas 80.000 saham yang masing-masing bernilai Rp.100.000,00. Perubahan terakhir tercatat pada Akta Notaris Satryo Aji, S.H. MKn., Nomor Akta 08 tanggal 28 Januari 2022, dimana telah disetujui jumlah dan komposisi Modal Disetor Perseroan

Komposisi modal yang telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Jumlah		
		Lembar	Nominal	%
1	Tn. Setya Jati Kusuma	3.256	Rp. 325.600.000,-	10,80
2	Tn. August Deva. W	500	Rp. 50.000.000,-	1,66
3	Tn. Djoko Sutrisno	5.000	Rp.500.000.000,-	16,58
4	Ny. Emy Damayanti. R (Pemegang Saham Pengendali)	11.250	Rp. 1.125.000.000,-	37,31
5	Tn. Bagus Prihartanto	2.500	Rp. 250.000.000,-	8,29
6	Tn. Hermawan Budi S	1.000	Rp. 100.000.000,-	3,32
7	Ny. Sri Widayati	417	Rp.41.700.000,-	1,38
8	Ny. Indrawati Hartono	3.211	Rp.321.100.000,-	10,65
9	Tn. Fairuzaqona Ulfati	1.000	Rp.100.000.000,-	2,32
10	Tn. Wawan Ari Wibowo	750	Rp.75.000.000,-	2,49
11	Ny. Grantika	500	Rp.50.000.000,-	1,66
12	Ny. Dian Ririt Dewayanti	150	Rp.15.000.000,-	0,50
13	Ny. Hayuditia Ansita Perdana	50	Rp.5.000.000,-	0,17
14	Tn. Drs. Haenis Gunarto	100	Rp. 10.000.000,-	0,33
15	Tn. Syamsul Ma'arif	466	Rp.46.600.000,-	1,55
Total		30.150	Rp.3.015.000.000,-	100,00

Jumlah tersebut merupakan 37,69 persen dari Modal Dasar Rp. 8.000.000.000,00 dan telah disetor serta ditempatkan.

BAB III
LAPORAN
PERKEMBANGAN USAHA

1. Ikhtisar Data Keuangan

PT BPR Bhakti Riyadi menjalankan kegiatan operasionalnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan menyediakan produk dan jasa meliputi penghimpunan dana (Dana Pihak Ketiga) dan penyaluran dana (Pembiayaan/ Kredit). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah yang semakin dinamis dengan upaya inovasi dan pengembangan produk serta layanan. Selain itu, PT BPR Bhakti Riyadi telah menyusun berbagai strategi pengembangan bisnis dalam rangka meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.

Bank percaya bahwa dengan pelayanan yang optimal menjadi penentu loyalitas nasabah bank. Untuk itu harus diterapkan strategi pengembangan bisnis yang lebih agresif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik untuk dapat terus tumbuh dan meraih target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Bank telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi, antara lain :

1. Tekanan pada pertumbuhan ekonomi global yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian domestik.
2. Perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan perbankan cepat, mudah dan efisien tetapi dihadapkan pada kerawanan terhadap ancaman kejahatan perbankan.
3. Pertumbuhan lembaga pembiayaan di sektor UMKM yang ekspansif.
4. Pertumbuhan UMKM yang terdidik dan terlatih yang harus diimbangi dengan pengembangan produk dan layanan yang menarik serta SDM yang kompeten.

PT BPR Bhakti Riyadi menjadikan hal tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk tetap mempertahankan keberlanjutan bisnis Bank.

Realisasi indikator bisnis utama Bank selama tahun 2023 secara umum mengalami pertumbuhan, dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama ditahun sebelumnya. Sampai akhir tahun 2023, Total Aset PT BPR Bhakti Riyadi mengalami kenaikan menjadi Rp.22.145.756 Ribu, Tabungan mengalami kenaikan menjadi Rp.3.456.487 Ribu, Deposito mengalami kenaikan menjadi Rp.8.863.200 Ribu. Namun mengalami kerugian sebesar Rp.29.148.410 Ribu. Berikut pencapaian kinerja Bank selama tahun 2023 :

(dalam ribuan rupiah)

NO	INDIKATOR KEUANGAN	DES-2022	DES-2023	PERTUMBUHAN	
				NOMINAL	%
1	Bunga Kontraktual	2,866,969	2,568,292	(298,677)	-10.42%
2	Provisi dan Jasa Administrasi	210,978	138,429	(72,549)	-34.39%
3	Jumlah Pend. Bunga	3,077,947	2,706,721	(371,226)	-12.06%
4	Beban Bunga	719,398	735,204	15,806	2.20%
5	Pend. Operasional Lainnya	289,759	397,502	107,743	37.18%
6	Jumlah Pend. Operasional	2,648,308	2,369,019	(279,289)	-10.55%
7	Beban Penyisihan Kerugian	7,750	35,841	28,091	3.624645161
8	Beban Pemasaran	20,244	26,438	6,194	30.60%
9	Beban Administrasi dan Umum	2,382,571	2,335,964	(46,607)	-1.96%
10	Beban Operasional Lainnya	10,555	16,519	5,964	56.50%
11	Jumlah Beban Operasional	2,421,120	2,414,762	(6,358)	-0.26%
12	Laba (Rugi) Operasional	227,188	(45,743)	(272,931)	-120.13%
13	Pend. Non Operasional	37,650	32,527	(5,123)	-13.61%
14	Beban Non Operasional	12,035	15,932	3,897	32.38%
15	Jml. Pend. (Beban) Non Ops	25,615	16,595	(9,020)	-35.21%
16	Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	252,803	(29,148)	(281,951)	-111.53%
17	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	224,647	(29,148)	(253,795)	-112.98%
18	Jumlah Aset	17,082,253	22,145,756	5,063,503	29.64%

a. Jumlah Aset

Jumlah Aset PT BPR Bhakti Riyadi ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.063.503 Ribu atau tumbuh sebesar 22,86 persen, yaitu dari Rp.17.082.253 Ribu di tahun 2022 menjadi Rp.22.145.756 Ribu diakhir tahun 2023.

b. Pendapatan Usaha**1) Pendapatan Bunga Kontraktual**

Pendapatan bunga kontraktual pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.298.677 Ribu atau turun sebesar 10.42 persen, yaitu dari Rp.2.866.969 Ribu ditahun 2022 menjadi Rp.2.568.292 Ribu di tahun 2023.

2) Pendapatan Provisi dan Jasa Administrasi

Pendapatan provisi dan jasa administrasi ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.72.549 Ribu atau turun sebesar 34.39 persen, yaitu dari Rp.210.978 Ribu ditahun 2022 menjadi Rp.138.429 Ribu diakhir 2023.

3) Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.107.743 Ribu atau naik sebesar 37.18 persen, yaitu dari Rp.289.759 Ribu ditahun 2022 menjadi Rp.397.502 Ribu pada tahun 2023.

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.5.123 Ribu atau turun sebesar 13.61 persen dari Rp.37.650 Ribu ditahun 2022 menjadi Rp.32.527 Ribu ditahun 2023.

c. Beban Usaha**1) Beban Bunga**

Beban bunga ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.15.806 Ribu atau naik sebesar 2.20 persen, yaitu dari Rp.719.398 Ribu ditahun 2022 menjadi Rp.735.204 Ribu ditahun 2023.

2) Beban Administrasi dan Umum

Beban administrasi dan umum ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.46.607 Ribu atau turun sebesar 1.96 persen, yaitu dari Rp.2.382.571 Ribu ditahun 2022 menjadi Rp.2.335.964 Ribu pada tahun 2023.

3) Beban Pemasaran

Beban pemasaran ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.6.194 Ribu atau naik sebesar 30.60 persen, yaitu dari Rp.20.244 Ribu ditahun 2022 menjadi Rp.26.438 Ribu ditahun 2023.

4) Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.964 Ribu atau naik sebesar 56.50 persen, yaitu dari Rp.10.555 Ribu di tahun 2022 menjadi Rp.16.519 Ribu pada tahun 2023.

5) Beban Non Operasional

Beban non operasional ditahun 2023 meningkat sebesar Rp.3.897 Ribu atau naik sebesar 32.38 persen, yaitu dari Rp.12.035 Ribu di tahun 2022 menjadi Rp.15.932 Ribu ditahun 2023.

d. Laba (Rugi) Bersih

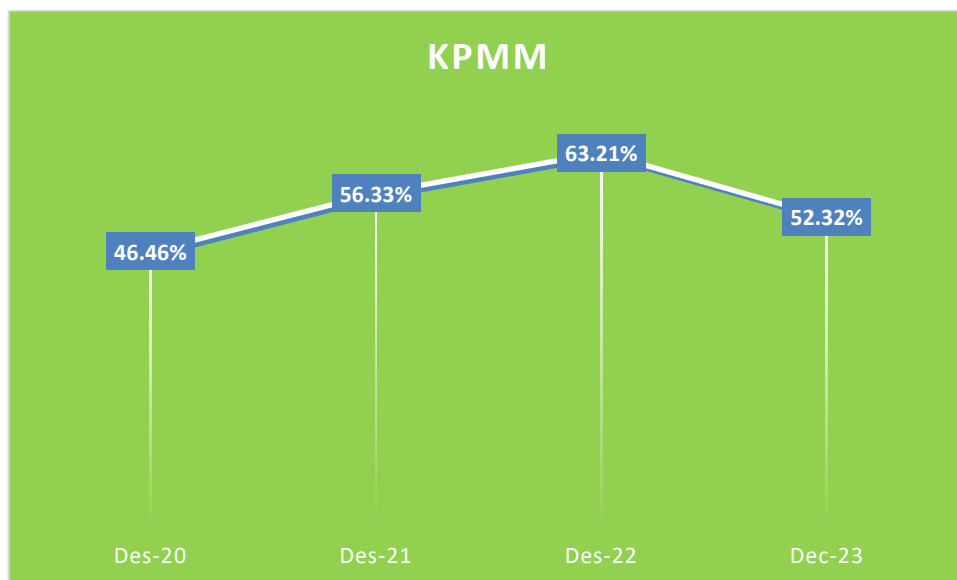
PT BPR Bhakti Riyadi ditahun 2023 mengalami Kerugian bahwa Rugi sebesar Rp.29.148 Ribu. Selisih laba jika dibandingkan dengan Laba tahun 2022 sebesar (Rp.253.148) Ribu atau rugi sebesar 112.98 persen.

2. Rasio Keuangan

Rasio Keuangan merupakan alat analisis keuangan untuk menilai kinerja suatu bank berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan. Pemakaian rasio keuangan tergantung kepentingan suatu bank dengan membandingkan nominal (angka-angka) pada jenis-jenis laporan keuangan sehingga unsur-unsur laporan keuangan, posisi keuangan dan kinerja manajemen dalam periode tertentu bisa terlihat.

a. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan merupakan salah satu cara untuk menghitung apakah jumlah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Rasio ini diukur melalui Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang merupakan rasio Modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR. KPMM merupakan indikator terhadap kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha dan menanggulangi risiko kerugian.

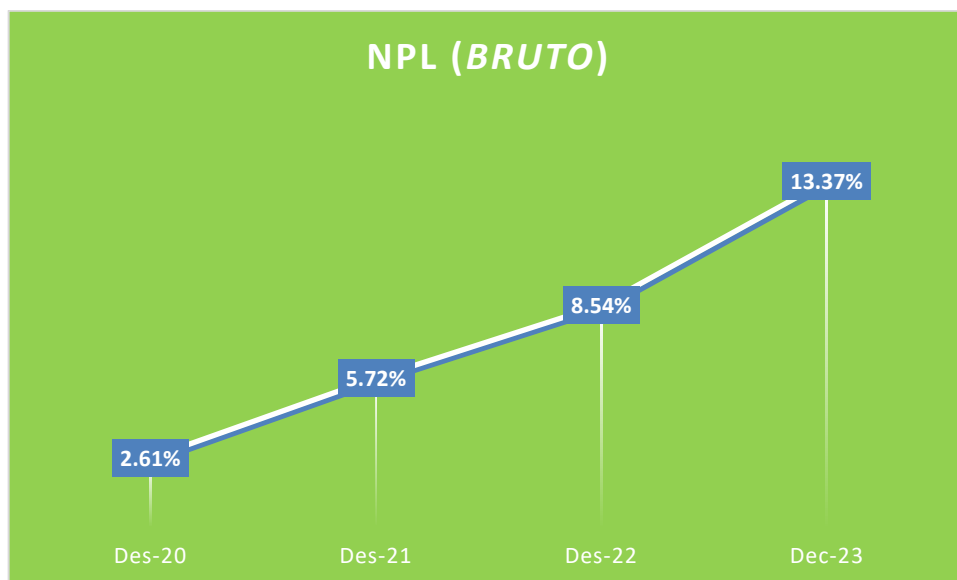


Realisasi rasio KPMM selama periode tahun 2020 – 2022 mengalami peningkatan dari 46.46 persen di bulan Desember 2020, menjadi 56.33 persen di bulan Desember 2021, menjadi 63.21 persen pada bulan Desember 2022, namun mengalami penurunan menjadi 52.32 persen pada bulan Desember 2023. Realisasi nilai rasio KPMM tersebut masih jauh diatas ketentuan OJK yaitu sebesar minimal 12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa permodalan yang dimiliki mampu untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Penurunan rasio KPMM terjadi seiring dengan kenaikan yang cukup signifikan dari penyaluran Kredit, sedangkan disisi lain tidak adanya tambahan modal disetor atau kenaikan laba yang jumlahnya signifikan.

b. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

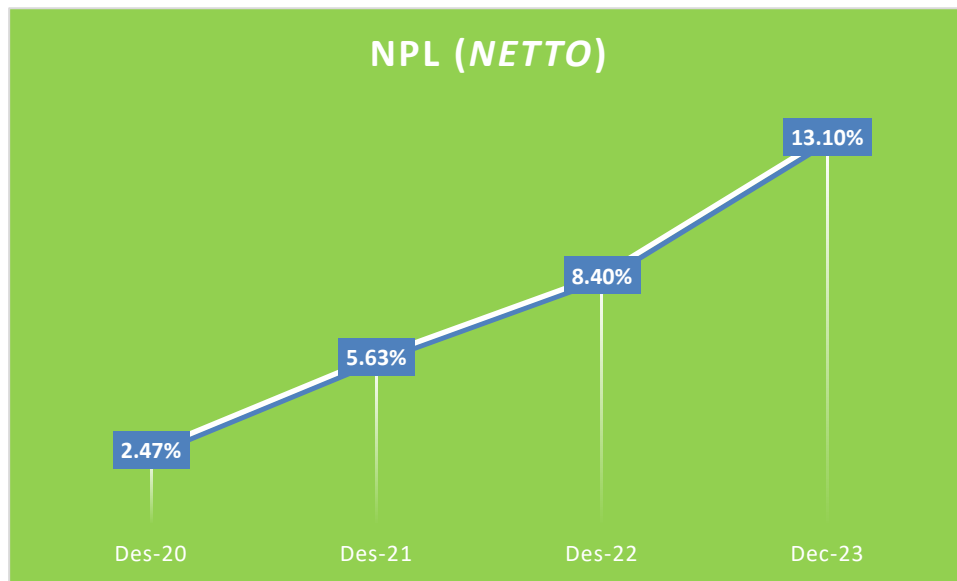
Aktiva produktif adalah penanaman dana dalam bentuk tabungan, deposito, kredit atau yang dipersamakan dengan itu dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Dalam laporan Neraca bank dapat dilihat pada pos Penempatan Antar Bank/ Antar Bank Aktiva dan Kredit Yang Diberikan. Rasio ini dikatakan SEHAT apabila persentasenya lebih kecil atau maksimal sebesar 5,0 persen.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja kualitas aktiva produktif bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank. NPL memang bisa berdampak pada berkurangnya modal bank. Jika hal ini dibiarkan, maka yang pasti akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya.



Bank mengalami kenaikan rasio NPL *bruto* secara signifikan, yaitu dari posisi 2.61 persen pada bulan Desember 2020, mengalami kenaikan sebesar 5.72 persen pada bulan Desember 2021, menjadi 8.54 persen pada bulan Desember 2022, dan pada akhir Desember 2023 NPL bruto mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar

13.37 persen. Realisasi NPL *bruto* tersebut jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,74 persen.



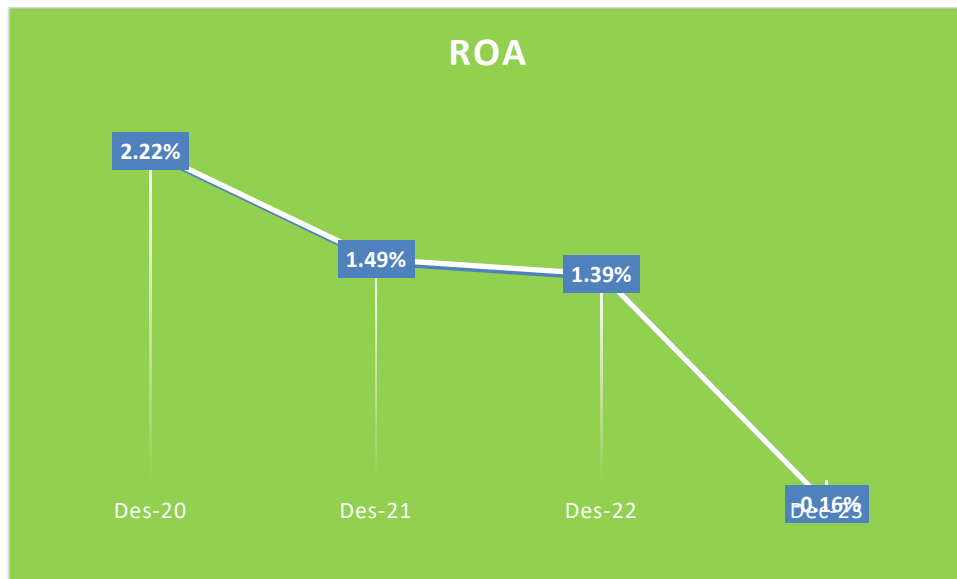
Rasio NPL *netto* yaitu dari posisi 2.47 persen pada bulan Desember 2020, mengalami kenaikan menjadi 5.63 persen pada bulan Desember 2021, dan mengalami kenaikan menjadi 8.40 persen pada bulan Desember 2022. Kembali naik secara signifikan sebesar 13.10 persen pada bulan Desember 2023. Hal ini mengindikasikan kenaikan jumlah aktiva produktif yang bermasalah terhadap total aktiva produktif. Dengan kondisi demikian maka Bank harus segera untuk berbenah diri dalam penurunan NPL.

c. Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas juga sering dikenal dengan istilah rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perolehan keuntungan dibandingkan pendapatan atau aktiva. Rasio rentabilitas bisa menilai kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang berkaitan erat dengan kelangsungan bank. Angka rentabilitas berupa angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Kondisi atau tingkat kesehatan bank juga terlihat dari rasio ini sehingga tujuan laporan keuangan bisa tercapai.

1) *Return on Asset (ROA)*

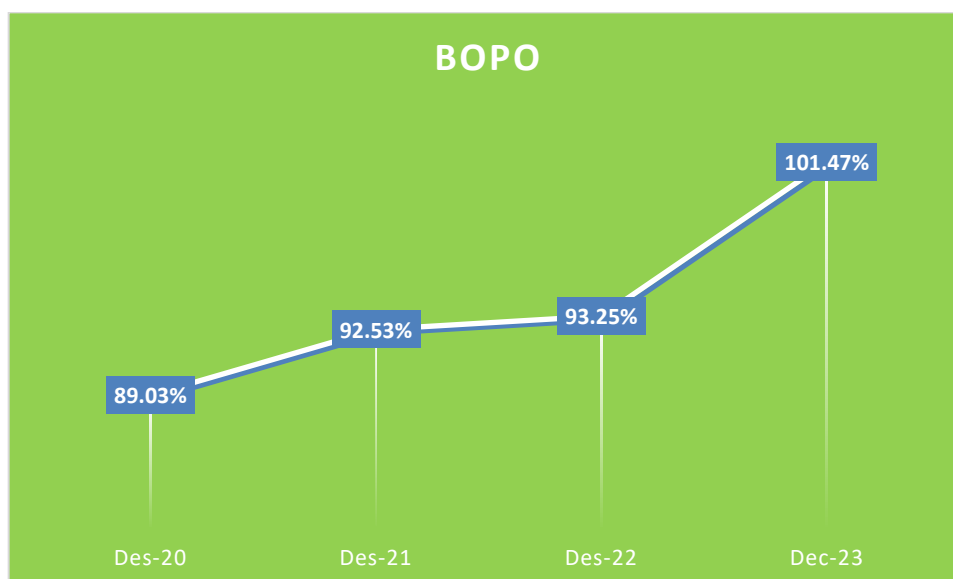
Return On Assets (ROA) merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam ROA, laba yang diukur berupa laba kotor sebelum bunga dan pajak atau EBIT dari aktiva yang dipakai. Semakin besar rasio ini maka kondisi bank semakin baik. Rasio ini disebut juga rentabilitas ekonomis yang menunjukkan kemampuan total aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba sehingga efektifitas bank dalam memanfaatkan seluruh sumber daya bisa terlihat.



Aktivitas penyaluran Kredit selama tahun 2023 belum berhasil meningkatkan pertumbuhan Laba. Rasio ROA pada bulan Desember 2020 sebesar 2.22 persen, pada bulan Desember 2021 turun menjadi 1.49 persen, pada bulan Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 1,39 persen dan pada bulan Desember 2023 sebesar -0.16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, mampu memberikan laba bagi Bank, namun belum optimal.

2) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Pengendalian biaya operasional terhadap pendapatan operasional dapat diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Biaya Operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk mendapatkan penghasilan, misalnya: Beban Bunga, Beban Pemasaran, dan Beban Tenaga Kerja. Sementara Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari Penempatan Dana Antar Bank, Penyaluran Dana dalam bentuk Kredit dan pendapatan operasional lainnya sehubungan dengan kegiatan bank. Semakin kecil rasio yang terbentuk maka semakin efisien operasional yang dijalankan oleh bank. Dalam lingkup BPR, rasio ini dikatakan sehat bila rasio $\leq 93,52$ persen.



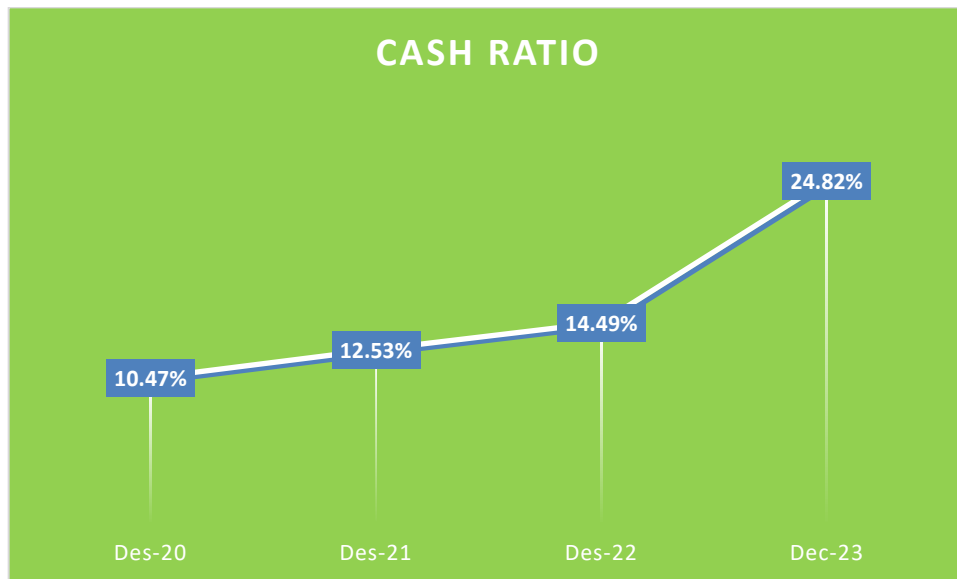
Sementara tingkat efisiensi usaha Bank dapat terkontrol dengan baik berdasarkan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang selama 3 tahun terakhir telah meraih predikat Sehat, yakni tercatat sebesar 89.03 persen pada tahun 2020, tercatat sebesar 92.53 persen pada tahun 2021, tercatat sebesar 93.25 persen pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar 101.47 persen. Secara umum, nilai rasio BOPO yang didapatkan mengindikasikan bahwa Bank telah lebih efisien dalam menjalankan operasionalnya.

d. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu bank dengan melihat aktiva lancar bank relatif terhadap hutang lancarnya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya keuangan suatu bank. Jika bank mampu memenuhi kewajibannya berarti bank tersebut likuid, sedangkan jika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti bank tersebut ilikuid. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

1) *Cash Ratio* (CR)

Cash Ratio (CR) digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Jika hasil rasio menunjukkan 1:1 atau 100 persen atau semakin besar perbandingan kas dengan utang maka akan semakin baik. CR merupakan rasio likuiditas yang paling ketat dan konservatif terhadap kemampuan bank dalam menutupi hutang atau kewajiban jangka pendeknya jika dibandingkan rasio-rasio likuiditas lainnya (rasio lancar dan rasio cepat). Hal ini dikarenakan CR hanya memperhitungkan aset atau aktiva lancar jangka pendek yang paling likuid yaitu kas dan setara kas yang paling mudah dan cepat untuk digunakan dalam melunasi hutang lancarnya.

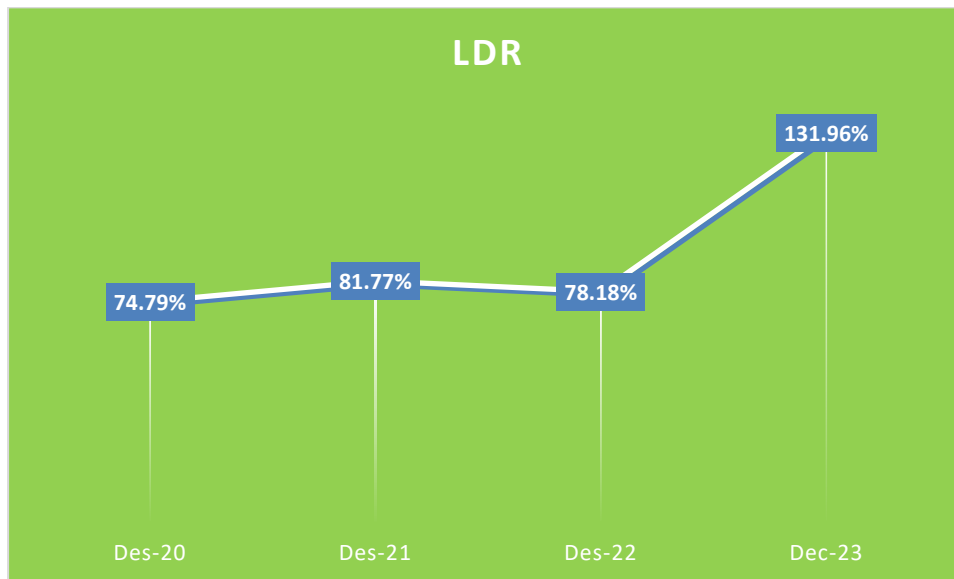


Meningkatnya jumlah Aset tetap diimbangi dengan likuiditas yang terkontrol. Nilai rasio Cash Ratio bulan Desember 2020 sebesar 10.47 persen, mengalami sedikit kenaikan sebesar 12.53 persen dibulan Desember 2021, mengalami kenaikan sebesar 14.49 persen pada bulan Desember 2022, dan pada Desember 2023 mengalami peningkatan 24.82 persen. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan Bank dalam melakukan pengelolaan kas yaitu penyediaan kas secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan likuiditas jangka pendek Bank agar tetap terjaga dengan baik.

2) *Loan to Deposti Ratio (LDR)*

Loan to Deposti Ratio (LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Tingkat rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau realtif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

Berdasarkan *best practice* saat ini, LDR yang diperkenankan adalah antara >78 – 92 persen. Artinya jika bank memiliki nilai LDR berkisar diangka tersebut dianggap bank-nya sehat dalam mengelola dananya.



Rasio LDR Bank masih mengalami naik turun yaitu sebesar 74.79 persen pada bulan Desember 2020, kemudian mengalami kenaikan sebesar 81.77 persen pada bulan Desember 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 78.18 persen namun pada bulan Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 131.96 persen. Perolehan tersebut belum optimal, karena masih dibawah dari target yang telah ditentukan sebesar 94.75 persen.

3. Tingkat kesehatan bank

Kesehatan bank menjadi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) yaitu pemilik bank, manajemen bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan pemerintah sebagai *regulator*. Dimaksudkan sebagai tolak ukur bagi pihak manajemen bank, apakah mereka menjalankan bisnis bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari permasalahan yang terjadi pada waktu lalu. Kepercayaan dari masyarakat dan stabilitas moneter di Indonesia merupakan faktor yang dipengaruhi dari hal tersebut. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik seperti dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat melaksanakan kebijakan moneter.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank merupakan pendekatan kualitatif dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai beberapa faktor yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional

Pencapaian kinerja keuangan Bank selama tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, mengindikasikan bahwa Bank telah memiliki kinerja keuangan yang membaik. Manajemen

dan seluruh Pegawai telah melakukan pengelolaan Bank sejalan dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.

Manajemen menghitung tingkat kesehatan Bank pada posisi per akhir Desember 2023 (sesuai rumus dan peringkat perhitungan terkini dari Otoritas Jasa Keuangan) sebagai berikut:

Faktor	Rasio	Peringkat
Permodalan		
* KPMM	52.32	1
Kualitas Aktiva Produktif		
*KAP	12.16	2
*NPL <i>netto</i>	13.10	5
*NPL <i>bruto</i>	13.37	5
Rentabilitas		
*ROA	-0.16	5
*BOPO	101.47	5
Likuiditas		
*Cash Ratio	24.82	1
*LDR	131.96	5

Pada periode tahun 2023, rata-rata Tingkat Kesehatan Bank mendapatkan nilai predikat “TIDAK SEHAT”. Nilai predikat tersebut yang akan menjadi prioritas perbaikan ditahun mendatang. Namun masih terdapat indikator rasio keuangan KPMM dan Cash Ratio dengan predikat “SEHAT” dan indikator rasio keuangan KAP dengan predikat “CUKUP SEHAT”.

Kualitas Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah

Langkah – langkah yang dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi untuk menjaga kualitas Kredit selama tahun 2023 belum menampakkan keberhasilannya, dimana nilai NPL yang dicapai sebesar 13.37 persen, sementara NPL yang direncanakan sebesar 4.78 persen. Sesuai hasil audit laporan keuangan tahun 2023 oleh Akuntan Publik (AP) M. Yudhika Elrifi.M.Sc,Ak,CA,BKP,CPA,CfrA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto dan Yudhika,

perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan adalah sebesar 13.37 persen (NPL *Bruto*) dan 13.10 persen (NPL *Netto*).

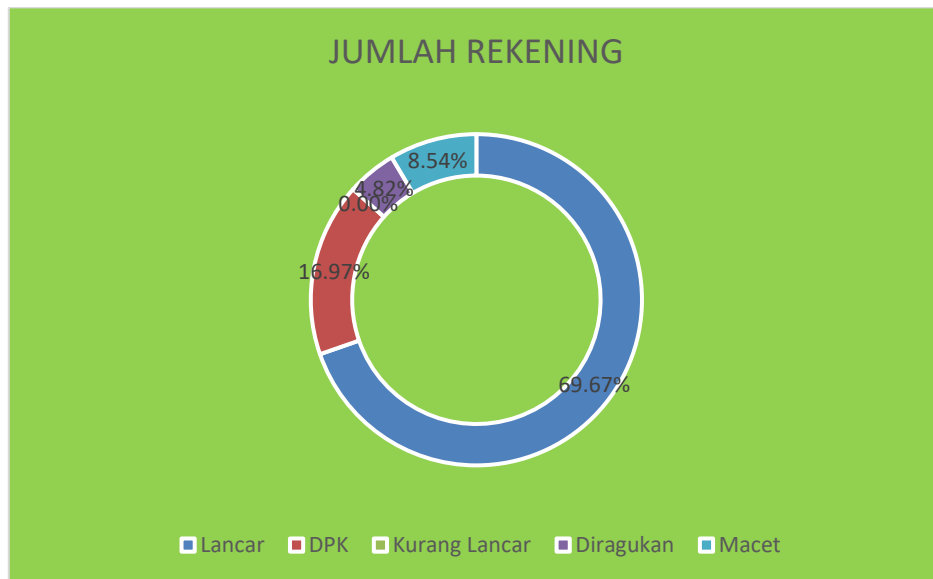
Penyebab utama kredit bermasalah, yaitu :

- a. Adanya risiko bisnis, musibah, bencana yang tidak dapat dihindari.
- b. Ketidaktepatan dalam prosedur pengajuan kredit sehingga tidak akurat dalam membuat keputusan pemberian kredit.
- c. Pemakaian kredit yang menyimpang atau debitur kurang mampu mengelola usahanya, akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik.
- d. Sistem dan prosedur pengawasan dan pembinaan dari Bank kepada debitur yang masih perlu diperbaiki.

Adapun komposisi kolektibilitas Kredit *netto* dibulan Desember 2023 sebagai berikut :

Kolektibilitas	Nominal Baki Debet (Rp. Ribu)	Persentase (%)
Lancar	11.458.109	69.67
DPK	2.790.810	16.97
Kurang Lancar	-	-
Diragukan	792.737	4.82
Macet	1.405.646	8.54
Jumlah	16.447.302	100,00%

Ditinjau dari nominal baki debet Kredit, maka komposisi kolektibilitas kredit Bank sebagian besar berada dalam kolektibilitas Lancar, yaitu sebesar 69.67 persen dengan nominal Rp.11.458.109 Ribu kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus, sebesar 16.97 persen dengan nominal Rp.2.790.810 Ribu. Apabila dilihat dari komposisi kualitas Kredit Bermasalah, persentase yang tertinggi berada dalam kolektibilitas Macet sebesar 8.54 persen dengan nominal sebesar Rp.1.405.646 Ribu, diikuti oleh Kolektibilitas Diragukan sebesar 4.82 persen dengan nominal Rp.792.737 ribu, sementara tidak terdapat kolektibilitas Kurang Lancar. Masih terdapat 22 (dua puluh dua) debitur yang masuk dalam kolektibilitas Kredit Macet, yang secara nominal didominasi oleh 4 debitur, yaitu Tri Nugroho ,Sugiyono, Guntur Dwi Prastyo dan Muhammad Hery Gunawan dengan baki debet kredit sebesar Rp.1.099.347 ribu atau 78.21 persen dari total jumlah Kredit Macet.



Bila dilihat dari sisi jumlah rekening, maka komposisi kolektibilitas Kredit Bank sebagian besar berada dalam kolektibilitas Lancar, yaitu sebanyak 167 rekening atau 69.67 persen dari jumlah keseluruhan rekening Kredit sebanyak 242 rekening. Sementara kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus sebanyak 50 rekening atau 16.97 persen. Untuk komposisi kualitas Kredit Bermasalah, maka persentase yang tertinggi berada dalam kolektibilitas Kredit Macet sebanyak 22 rekening atau 8.54 persen dari jumlah keseluruhan rekening Kredit. Sementara tidak terdapat kolektibilitas Kurang Lancar dan kolektibilitas Diragukan ada 3 rekening atau 4.82 persen dari jumlah keseluruhan rekening Kredit.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari segenap jajaran di Bank untuk segera menyelesaikan permasalahan Kredit Macet ini sehingga tidak akan menyebabkan kerugian akibat pembentukan PPAP dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Selanjutnya Bank akan memprioritaskan penyelesaian Kredit Macet atas nama Tri Nugroho, Sugiyono, Guntur Dwi Prastyo, Agung Widodo, dan Muhammad Hery Gunawan serta menyelesaikan debitur Kredit Bermasalah lainnya, serta menjaga kolektibilitas kredit yang lainnya agar selalu Lancar, sehingga kualitas kredit Bank masuk dalam kategori Sehat.

Selama tahun 2023, Bank belum berhasil menyelesaikan sejumlah Kredit bermasalah yang berdampak pada kenaikan nilai NPL di atas 5 persen. Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui jalan penagihan internal dan jalur hukum dengan pertimbangan nominal baki debit relatif besar dan debitur tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya.

Berikut ini kami lampirkan realisasi penyelesaian sejumlah Kredit bermasalah selama tahun 2023:

No	Nama	Tindakan	Penyelesaian	Nominal	Hasil
1.	Jumanto	Penagihan	Februari 2023	Rp.17.421.200,-	Lunas
2.	Saniyem	Penagihan	Februari 2023	Rp.2.785.500,-	Lunas
3.	Joko Rinawan	Penagihan	Februari 2023	Rp.10.000,-	Lunas
4.	Mulyadi	Penagihan	Februari 2023	Rp.37.108.000,-	Lunas
5.	Sumarno	Penagihan	Maret 2023	Rp.10.000,-	Lunas
6.	Munadi Purnomo	Penagihan	April 2023	Rp.12.260.000,-	Lunas
7.	Ari Cahyadi	Penagihan	Agustus 2023	Rp.115.532.900,-	Lunas
8.	Pardiyanto	Penagihan	September 2023	Rp.302.198.500,-	Lunas
9.	Tukino	Penagihan	November 2023	Rp.4.979.090,-	Lunas
10.	Sunarno ST	Penagihan	November 2023	Rp.70.022.500,-	Lunas
11.	Narto Wiyono	Penagihan	Desember 2023	Rp.1.478.000,-	Lunas
12.	Sunardi	Penagihan	Desember 2023	Rp.10.000,-	Lunas
13.	Marjuki	Penagihan	Desember 2023	Rp.34.103.000,-	Lunas
				Rp.597.918.690,-	

4. Perkembangan Usaha

Penyaluran kredit diarahkan pada kredit produktif dan konsumtif, dimana kredit produktif secara umum meningkatkan potensi UMKM yang berada di Kabupaten Klaten sedangkan Kredit Konsumtif secara umum untuk pemenuhan kebutuhan akan barang konsumsi. Sementara struktur pendanaan operasional ditunjang dari sumber-sumber dana masyarakat berupa tabungan dan deposito. Untuk mengisi kekurangan/ gap antara portofolio kredit

dengan dana masyarakat yang mampu dimobilisasi oleh Bank, maka digunakan dana antar bank pasiva dan pinjaman dari Bank lain (bank umum dan BPR).

Di tengah kondisi ekonomi dan industri perbankan yang penuh tantangan, secara umum realisasi rencana bisnis yang dicapai pada tahun 2023 memberikan keyakinan bahwa kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan telah membawa Bank ke arah yang lebih baik dan siap melangkah di periode mendatang. Meskipun beberapa indikator kinerja keuangan Bank belum mencapai target yang ditetapkan, namun hal tersebut masih di dalam koridor Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023. Selanjutnya, Bank telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi, antara lain :

- a. Tekanan pada pertumbuhan ekonomi global yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian domestik.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan perbankan cepat, mudah dan efisien tetapi dihadapkan pada kerawanan terhadap ancaman kejahatan perbankan.
- c. Pertumbuhan lembaga pembiayaan di sektor UMKM yang ekspansif.
- d. Pertumbuhan UMKM yang terdidik dan terlatih yang harus diimbangi dengan pengembangan produk dan layanan yang menarik serta SDM yang kompeten.

Oleh karenanya, perusahaan dari berbagai industri telah melakukan langkah – langkah antisipatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam rangka mempertahankan basis pengguna jasa dan produk serta meningkatkan *market share* terhadap industri. Hal yang sama juga tentunya berlaku di industri perbankan dan saat ini para pengurus Bank terus melakukan inisiatif strategis agar perusahaan yang dipimpinnya dapat *survive* dan tumbuh secara *sustainable*. Hal tersebut akan menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi PT BPR Bhakti Riyadi melalui penyediaan SDM yang lebih *responsive* terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan ekspektasi segmen nasabah yang akan lebih *demanding* terhadap layanan digital yang mendukung mobilitas nasabah.

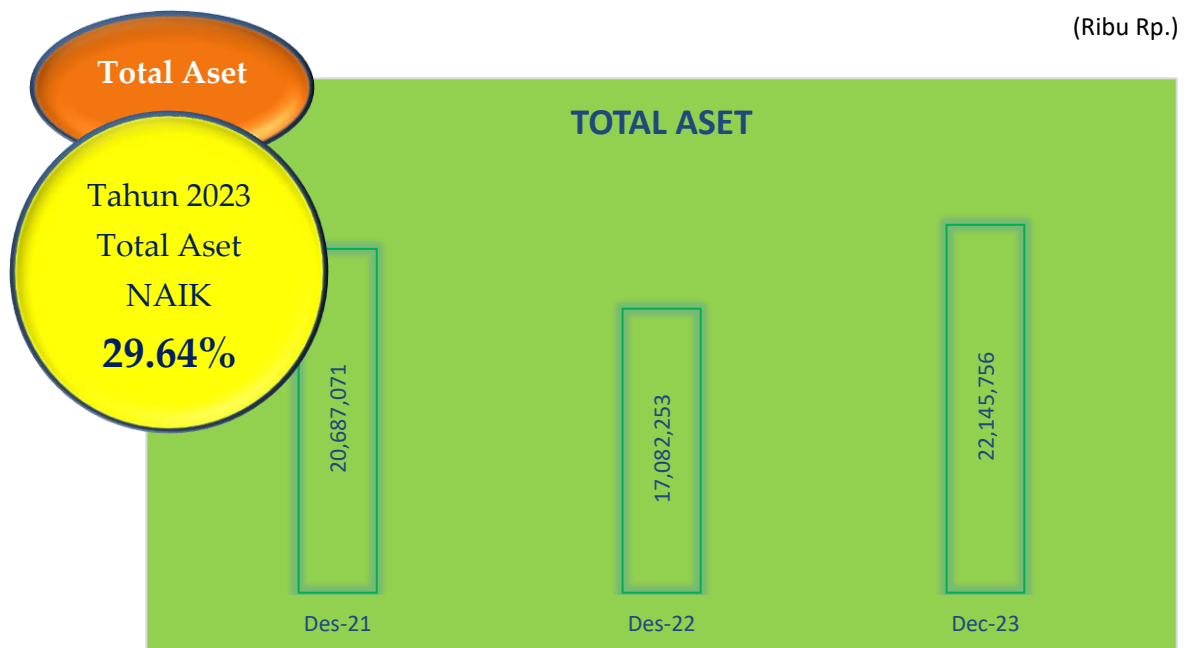
Prospek dan tantangan di masa mendatang menjadi pendorong bagi PT BPR Bhakti Riyadi untuk terus melanjutkan usaha demi mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan dan meningkatkan daya saing di industri perbankan yang makin *hypercompetitive*. Sepanjang tahun 2023 PT BPR Bhakti Riyadi melalui kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang mendasari setiap insan di dalam Bank, namun belum membuahkan hasil pencapaian kinerja yang positif bagi kelangsungan usaha Bank, dimana sebagian besar indikator bisnis utama Bank belum mencapai target yang ditetapkan.

Berikut realisasi program kerja sampai dengan 31 Desember 2022 :

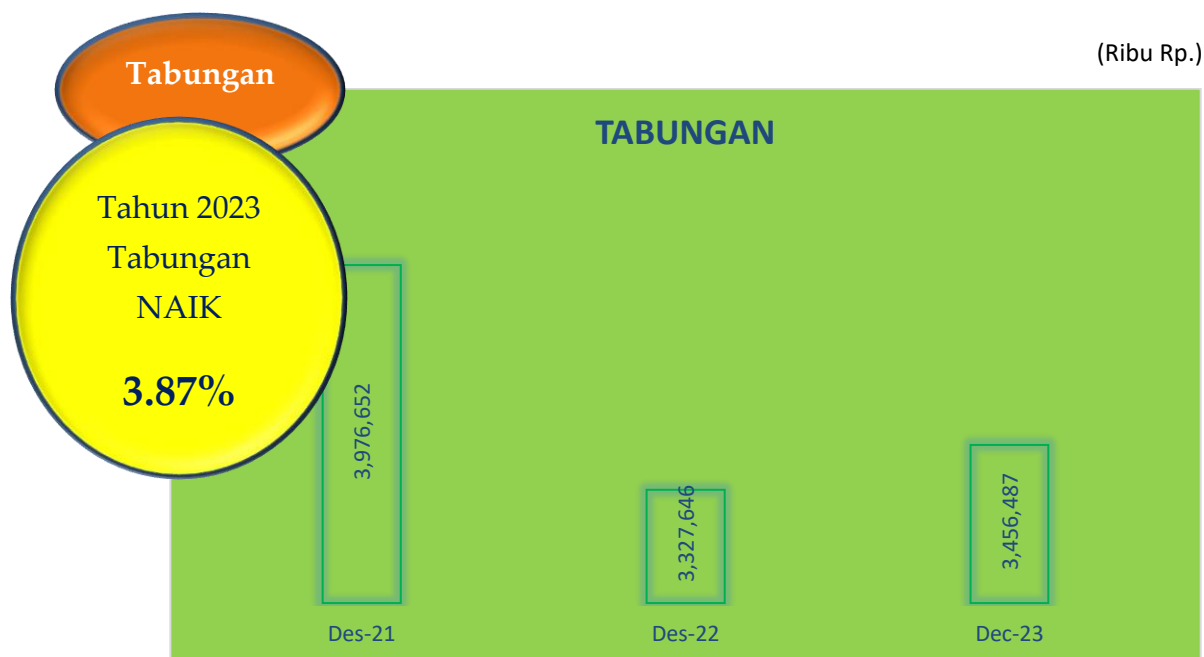
(dalam ribuan rupiah)

No	Keterangan	Realisasi			Pertumbuhan (yoy)		Target 2023	Pencapaian Target	
		Des-21	Dec-22	Dec-23	Nominal	%	Dec-23	Nominal	%
1	KREDIT - netto	13,901,314	12,342,969	16,257,003	3,914,034	31.71%	18,110,000	(1,852,997)	89.77%
2	TABUNGAN	4,083,910	3,327,646	3,456,487	128,841	3.87%	4,794,442	(1,337,955)	72.09%
3	DEPOSITO	8,192,200	7,673,200	8,863,200	1,190,000	15.51%	8,740,200	123,000	101.41%
4	SIMPANAN	12,276,110	11,000,846	12,319,687	1,318,841	11.99%	13,534,642	(1,214,955)	91.02%
5	ASET	18,640,670	17,082,253	22,145,756	5,063,503	29.64%	20,482,190	1,663,566	108.12%

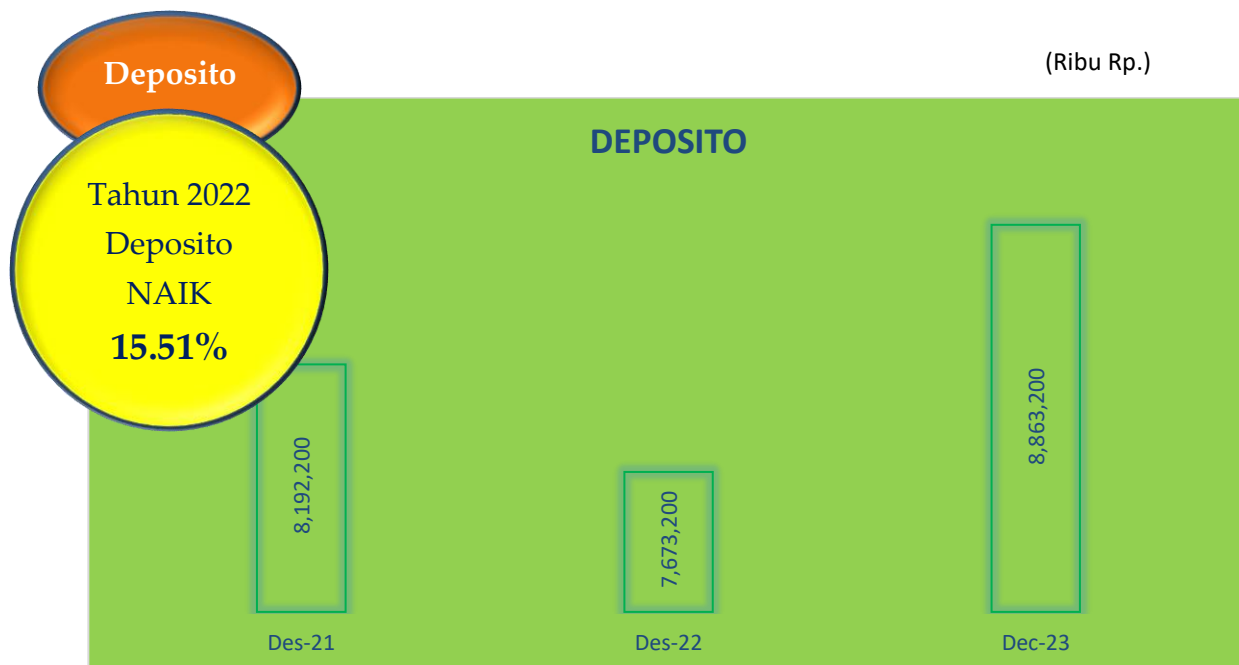
Penyusunan strategi yang baik dan tepat sasaran menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Bank dalam menjalankan bisnis ke depan yang telah mencapai target bisnis yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Realisasi Neraca posisi 31 Desember 2023, pertumbuhan jumlah Aset mencapai 108.12 persen atau naik sebesar Rp.1.663.566 ribu, dari Rp.17.082.253 ribu pada bulan Desember 2022 menjadi Rp.22.145.756 ribu pada bulan Desember 2023 (year on year/ yoy).



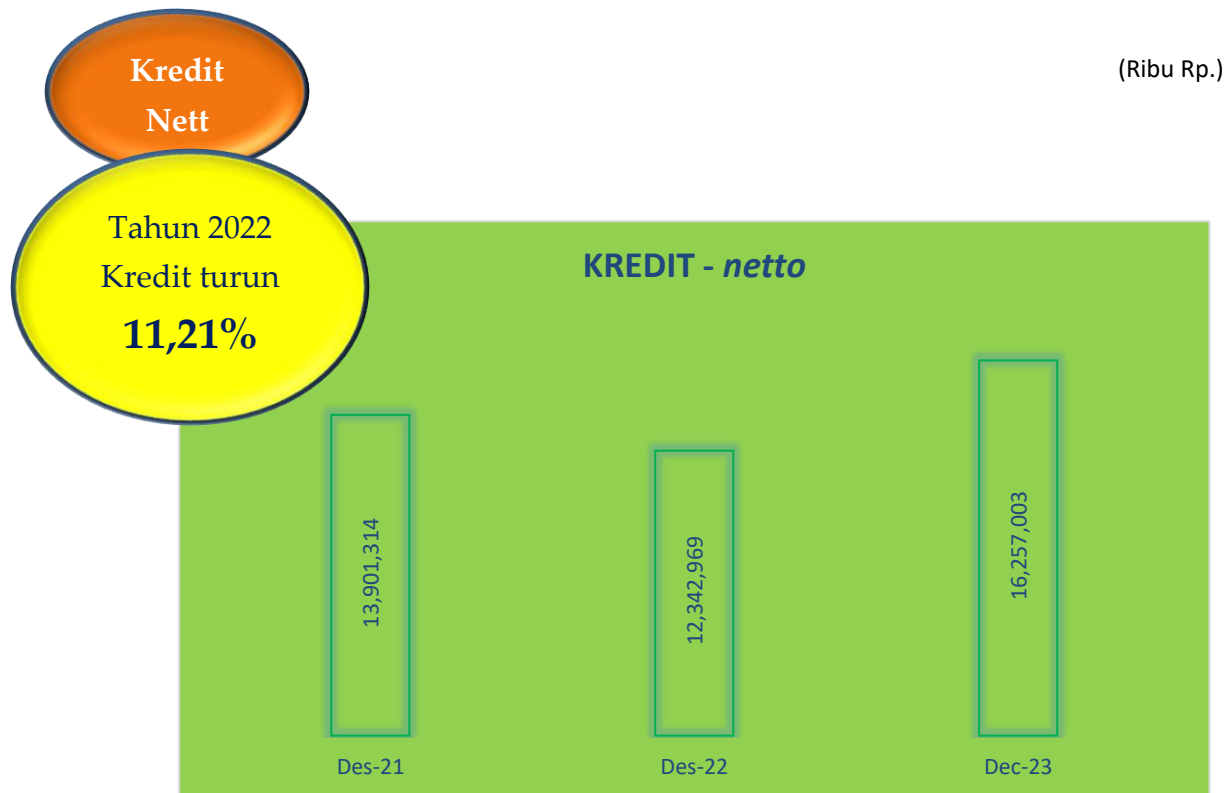
Jumlah Asset pada bulan Desember 2021 sebesar Rp.20.687.071 Ribuan, pada bulan Desember 2022 turun menjadi Rp.17.082.253 Ribuan, pada bulan Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.22.145.756 Ribuan.



Jumlah Tabungan pada bulan Desember 2021 sebesar Rp.3.976.652 Ribu, pada bulan Desember 2022 turun sedikit menjadi Rp.3.327.646 Ribu, pada bulan Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.456.487 Ribu.



Jumlah Deposito pada bulan Desember 2021 sebesar Rp.8.192.200 Ribu, pada bulan Desember 2022 turun menjadi Rp.7.673.200 Ribu, pada bulan Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.863.200 Ribu.



Kenaikan jumlah aset tersebut juga dibarengi dengan peningkatan aset produktif berupa kredit, dimana jumlah kredit yang disalurkan (*netto*) pada bulan Desember 2021 sebesar Rp.13.901.314 Ribu, pada bulan Desember 2022 turun menjadi Rp.12.342.969 Ribu, pada bulan Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.16.257.003 Ribu.

5. Pengembangan Jaringan Kantor

Dari aspek non keuangan, sesuai RBB tahun 2023 ini tidak ada rencana pengembangan jaringan kantor dan layanan. Sehingga sampai saat ini, Bank memiliki 3 (tiga) unit kantor kas, yaitu di Kecamatan Cawas, Juwiring, dan Jatinom.

6. Faktor Pendorong

Meskipun Keberhasilan Bank dalam mencapai rencana bisnis belum seperti yang diharapkan, namun Bank tetap terus berusaha untuk mencapai target yang telah ditentukan, terutama disebabkan oleh faktor pendorong sebagai berikut :

a. Kredit

- 1) Pengembangan fitur produk skim Kredit.
- 2) Penetapan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- 3) Penyempurnaan proses bisnis dengan tetap memperhatikan kecepatan proses dan kualitas kredit yang baik.

- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga SDM khususnya di bagian penyaluran kredit.
- 5) Penyelesaian atas sejumlah kredit bermasalah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

b. Dana Pihak Ketiga

- 1) Pengembangan fitur produk Tabungan dan Deposito.
- 2) Penetapan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga SDM khususnya di bagian penghimpunan dana.
- 4) Pemasaran yang aktif dan peningkatan kualitas layanan.

2. Langkah-Langkah Perbaikan

Dalam rangka memperbaiki kinerja tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyusun dan menerapkan strategi perbaikan kinerja sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

- 1) Strategi pemasaran yang efektif dan menarik, berupa terselenggaranya kegiatan dan sarana pemasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan terwujudnya kegiatan pemasaran yang terintegrasi melalui sinergi di semua lini.
- 2) Untuk menjaga posisi likuiditas secara keseluruhan, Bank akan terus mengkaji perkembangan dan tren likuiditas sektor perbankan. Dana tabungan akan tetap menjadi sumber likuiditas utama. Apabila diperlukan, Bank dapat secara aktif menghimpun dana dari produk deposito dengan menyesuaikan tingkat suku bunga. Hal tersebut diperlukan guna menjaga posisi dana pihak ketiga dan mempertahankan posisi likuiditas yang kokoh dan sehat.
- 3) Mengembangkan layanan pembayaran secara virtual account yang bermitra dengan bank umum untuk mempercepat pelayanan dan menjaring potensi nasabah baru.
- 4) Meningkatkan jumlah dan skill staf pemasaran DPK dan menerapkan sistem *reward and punishment* untuk memotivasi pemasaran DPK.
- 5) Secara bertahap mengurangi komposisi sumber dana Bank yang berasal dari Deposito dan menggantikannya dengan struktur pendanaan yang lebih murah yaitu Tabungan.
- 6) Membangun hubungan yang lebih baik dan intens kepada nasabah untuk memperluas jaringan DPK.

b. Penyaluran Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah

- 1) Meningkatkan jumlah penyaluran kredit baru yang sehat dengan menerapkan secara ketat prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pemberian kredit.
- 2) Membuat inovasi produk, menerapkan strategi pemasaran yang menarik bagi nasabah, dan menerapkan sistem *reward and punishment* untuk meningkatkan pemasaran Kredit.
- 3) Program retensi nasabah berupa pemberian insentif (suku bunga ringan atau potongan bunga) dan atau *souvenir/ gimmick* kepada nasabah baik dana maupun kredit yang memenuhi kriteria.
- 4) Memperbaiki dan melengkapi prosedur dan ketentuan perkreditan sesuai dengan kebutuhan bisnis, GCG dan manajemen risiko.
- 5) Melakukan pemetaan dan kajian secara intensif terhadap seluruh portofolio kredit eksisting. Untuk kelompok kredit yang bermasalah atau yang berpotensi menjadi kredit bermasalah, dibentuk tim khusus penanganan kredit bermasalah melalui penagihan, restrukturisasi kredit, maupun pelunasan/ penyelesaian kredit.
- 6) Menerapkan *early warning signal* dengan mengantisipasi keterlambatan pembayaran angsuran kredit sedini mungkin.
- 7) *Action Plan* penyelesaian kredit bermasalah utamanya yang Macet diprioritaskan terselesaikan dan menjaga agar kredit Lancar tetap dalam keadaan lancar dengan melakukan pembinaan dan penagihan sehingga NPL *gross* tidak melebihi 5,0%.
- 8) *Melaksanakan Action Plan* penyelesaian kredit hapus buku secara berkesinambungan, khususnya kepada debitur hapus buku yang diketahui keberadaan tempat tinggal dan agunannya diprioritaskan untuk segera terselesaikan.

c. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas merupakan komitmen tertinggi PT BPR Bhakti Riyadi dalam rangka mendukung peran dan kontribusi SDM secara optimal untuk mewujudkan strategi dan target usaha Bank. PT BPR Bhakti Riyadi memandang SDM merupakan modal terpenting bagi perusahaan, sehingga senantiasa menjadi prioritas dalam pengelolaannya. Dan karenanya, Bank secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian pada sistem dan prosedur SDM.

PT BPR Bhakti Riyadi secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya untuk membentuk dan mengembangkan SDM menjadi handal, terampil dan profesional yang akan melahirkan pegawai yang produktif. Disamping itu, kesejahteraan pegawai akan menumbuhkan rasa nyaman untuk berkarya lebih maksimal, sehingga akan berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan *returns* bagi Bank. Peningkatan potensi SDM

menjadi perhatian utama manajemen untuk dikelola secara berkelanjutan agar SDM Bank dapat memberdayakan potensinya dengan optimal dalam mencapai tujuan, visi dan misi sehingga Bank dapat berada pada posisi yang lebih baik dan kompetitif di masa mendatang.

1) Penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Bank didukung dengan SDM berjumlah 19 (sembilan belas) Pegawai dan Pengurus, yaitu :

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	2 Orang
Direksi	2 Orang
Pegawai	17 Orang

Adapun tingkat/ jenjang pendidikan dari SDM tersebut terdiri dari :

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Sarjana (S1/ S2)	16 Orang
Diploma	2 Orang
Sekolah Menengah	3 Orang

1) Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2023 telah dilakukan rekrutmen terbuka Pegawai baru yang ditujukan untuk mengganti posisi Pegawai yang keluar /mengundurkan diri dari Bank atau mengisi posisi yang kosong karena proses mutasi/ rotasi Pegawai. Pada tahun 2023, Bank merencanakan untuk penambahan jumlah SDM sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu 1 (satu) orang untuk posisi PE SPI dan 7 (tujuh) orang untuk staf SDM untuk meningkatkan pemasaran dan pelayanan produk serta jasa Bank.

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya meningkatkan kinerja Bank memerlukan SDM yang profesional dan tangguh, dimana diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara formal maupun informal berupa pelatihan internal pegawai maupun mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pendidikan

perbankan. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM, Bank telah berpartisipasi pada beberapa program pelatihan/ pengembangan SDM baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang merupakan kegiatan dari regulator/ asosiasi.

Untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM di tahun 2023, Bank menyediakan anggaran biaya pendidikan dan pelatihan yang besarnya minimal sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 2,5 persen dari Biaya Tenaga Kerja tahun lalu atau sebesar $\pm$ Rp.48.600.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Hingga posisi 31 Desember 2023, telah direalisasikan biaya pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM sebesar Rp.48.866.950,- atau lebih dari 100 persen dari anggaran biaya pendidikan dan pelatihan tahun 2023. Adapun realisasi pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan ditahun 2023 beberapa di antaranya adalah :

- a) Menyelenggarakan pelatihan internal Motivasi dan Aspek Hukum.
- b) Menyelenggarakan pelatihan penyegaran APU-PPT.
- c) Menyelenggarakan pelatihan Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi RBB.
- d) Menyelenggarakan pelatihan internal Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi RBB.
- e) Mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan/ seminar/ *workshop* yang diselenggarakan oleh OJK, BI, LPS, Perbarindo maupun lembaga pendidikan lainnya
- f) Kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3) Penerapan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja

Berupa pelaksanaan sistem Penilaian Berbasis Kinerja yang berpedoman pada prinsip keterbukaan dan kehati-hatian untuk lebih meningkatkan produktivitas unit kerja dengan metode sebagai berikut :

- a) Penyelarasan organisasi melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) pada setiap jenjang organisasi serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara tepat waktu/*time to market* hal tersebut dilakukan melalui penyempurnaan *blueprint* SDM . Untuk itu fokus Bank dibidang penguatan SDM dan Organisasi adalah melakukan asesmen pada unit kerja strategis untuk memperkuat fundamental Bank dan menyiapkan kader pimpinan Bank dimasa mendatang.
- b) Bagi pegawai yang dinilai kompeten dan berprestasi di bidangnya akan diberikan kenaikan jabatan untuk mengisi posisi yang tersedia di dalam struktur organisasi, khususnya jabatan pegawai pimpinan. Disisi lain, hal ini

juga untuk memberikan kepastian jenjang karir (*career path*) yang jelas bagi pegawai.

- c) Memberikan kenaikan gaji/ upah untuk meningkatkan loyalitas dan kesejahteraan pegawai serta sebagai kompensasi inflasi tahunan yang telah diwujudkan dengan kenaikan gaji Pegawai tahun 2023.
- d) Pemberian insentif atas prestasi kerja insan Bank.

d. Pengendalian biaya

Upaya pengendalian biaya dilakukan dengan jalan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional kantor melalui :

- 1) Penghimpunan sumber pendanaan berbiaya rendah, yaitu Tabungan, untuk mendukung profitabilitas dan penguatan struktur pendanaan. Kedepan, Bank akan melanjutkan berbagai program kerja yang dapat meningkatkan pendanaan yang berasal dari tabungan. Pertumbuhan tabungan menjadi hal penting bagi Bank mengingat tabungan merupakan sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga yang rendah dan memiliki keunggulan sebagai sumber dana yang stabil.
- 2) Melakukan evaluasi likuiditas Bank secara periodik sehingga bila terjadi kelebihan likuiditas dan belum dapat disalurkan ke kredit, dana yang ada dapat disalurkan sementara waktu dalam bentuk penempatan dana antar bank, baik di Bank Umum maupun BPR lainnya.
- 3) Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan, yaitu mengutamakan keperluan yang penting dan mendesak, serta selalu berupaya untuk mencari produk dan layanan yang memberikan *value for money* lebih baik.
- 4) Berupa kegiatan perbaikan dan penghematan dalam aktivitas sehari-hari Bank yang ditujukan untuk mengurangi beban/ biaya yang timbul tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada nasabah khususnya di bidang operasional dengan cara antara lain:
 - a) Efektifitas penggunaan alat penerangan dan pendingin ruangan, antara lain dengan penggunaan lampu hemat energi (LED) dan penggunaan pendingin ruangan *low watt*.
 - b) Melakukan program penghematan yang konsisten dan menyeluruh, mulai dari hal-hal kecil seperti mematikan lampu penerangan dan pendingin ruangan apabila ruangan tidak dipakai, memastikan aliran air dan gas telah dimatikan, menggunakan kertas bekas/ buram untuk konsep surat, dan langkah-langkah penghematan lainnya.
 - c) Membuat skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan kantor.



BAB IV

LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT BPR Bhakti Riyadi disusun berdasarkan laporan yang sebenarnya seperti yang dilaporkan setiap bulannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR). Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Bhakti Riyadi tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Akuntan Publik (AP) M. Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak, CA, BKP, CPA, CFA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto dan Yudhika, terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Opini dari hasil laporan auditor independen yaitu, laporan keuangan PT BPR Bhakti Riyadi menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca PT BPR Bhakti Riyadi tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAK ETAP PA BPR.

a. Neraca

✓ Aset

PT. BPR BHAKTI RIYADI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2023	31 Des 2022
ASET			
Kas	3.1	94.929.100	35.524.000
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	3.2	187.141.655	188.185.855
Penempatan Pada Bank Lain	3.3	4.799.339.155	3.632.569.479
Kredit yang Diberikan	3.4	16.447.302.030	12.502.277.217
Provisi & Administrasi	3.4	(188.712.931)	(151.713.551)
Pendapatan Bunga Ditangguhkan	3.4	(1.585.921)	(7.594.619)
PPAP Kredit Yang Diberikan	3.4	(106.757.973)	(80.917.257)
Aset Tetap dan Inventaris	3.5	1.674.836.274	1.618.037.744
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	3.5	(999.289.891)	(899.727.368)
Aset Tidak Berwujud	3.6	32.007.745	32.007.745
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.6	(32.007.744)	(32.007.744)
Aset Lain-Lain	3.7	238.554.725	245.611.570
Jumlah Aset		22.145.756.224	17.082.253.071

✓ **Kewajiban dan Ekuitas**

KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	3.8	93.654.322	150.455.889
Utang Bunga	3.9	36.308.165	19.245.319
Utang Pajak	3.10	-	3.823.534
Simpanan	3.11		
Tabungan		3.456.487.246	3.327.645.940
Deposito Berjangka		8.863.200.000	7.673.200.000
Simpanan dari Bank Lain	3.12	5.233.155.500	1.422.120.313
Kewajiban Imbalan Kerja	3.13	124.818.750	80.568.750
Kewajiban Lain-Lain	3.14	63.809.153	101.721.828
Jumlah Kewajiban		17.871.433.136	12.778.781.573
EKUITAS			
	3.15		
Modal Dasar		8.000.000.000	8.000.000.000
Modal Belum Disetor		(4.985.000.000)	(4.985.000.000)
Modal Disetor		3.015.000.000	3.015.000.000
Saldo Laba			
Cadangan Umum		400.000.000	400.000.000
Laba Yang Belum Ditentukan Tujuannya:			
Laba (Rugi) Tahun Lalu		888.471.498	663.824.448
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(29.148.410)	224.647.050
Jumlah Saldo Laba		1.259.323.088	1.288.471.498
Jumlah Ekuitas		4.274.323.088	4.303.471.498
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		22.145.756.224	17.082.253.071

b. Laporan Laba Rugi

PT. BPR BHAKTI RIYADI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2023	31 Des 2022
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga	3.16	2.568.292.397	2.866.969.166
Pendapatan Provisi dan Administrasi	3.16	138.428.870	210.977.755
Beban Bunga	3.18	(735.204.151)	(719.398.789)
Pendapatan Operasional Lainnya	3.17	397.502.512	289.758.915
Jumlah Pendapatan Operasional		2.369.019.628	2.648.307.047
Beban Operasional			
Beban Penyisihan Kerugian	3.19	35.840.716	7.750.000
Beban Pemasaran	3.20	26.438.440	20.244.201
Beban Administrasi dan Umum	3.21	2.335.964.691	2.382.571.406
Beban Operasional Lainnya	3.22	16.518.900	10.554.600
Jumlah Beban Operasional		2.414.762.747	2.421.120.207
Laba (Rugi) Usaha		(45.743.119)	227.186.840
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional			
Pendapatan non-operasional	3.23	32.527.419	37.649.654
Beban non-operasional	3.24	(15.932.710)	(12.035.000)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		16.594.709	25.614.654
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(29.148.410)	252.801.494
Taksiran Pajak Penghasilan	3.25		(28.154.444)
Laba (Rugi) Neto		(29.148.410)	224.647.050

c. Laporan Perubahan Ekuitas

PT. BPR BHAKTI RIYADI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Modal	Saldo Laba			Jumlah Ekuitas
	Modal Saham	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Blm Ditentukan Tujuannya	
Saldo 31 Desember 2021	3.015.000.000	-	400.000.000	663.824.448	4.078.824.448
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	224.647.050	224.647.050
Saldo 31 Desember 2022	3.015.000.000	-	400.000.000	888.471.498	4.303.471.498
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	(29.148.410)	(29.148.410)
Saldo 31 Desember 2023	3.015.000.000	-	400.000.000	859.323.088	4.274.323.088

d. Komitmen dan Kontijensi

	<u>31 Desember</u> <u>2023</u> <i>(Audited)</i>	<u>31 Desember</u> <u>2022</u> <i>(Audited)</i>
Tagihan kontijensi:		
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	362.929.460	226.455.760
Aktiva Produktif yang Dihapusbukukan:		
Pokok Kredit Produktif Hapus Buku	306,900,500	306,900,500
Bunga Kredit Hapus Buku		
Jumlah Tagihan Kontijensi	<u><u>669.829.960</u></u>	<u><u>533.356.260</u></u>

e. Laporan Arus Kas

PT. BPR BHAKTI RIYADI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	31 Des 2023	31 Des 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Neto	(29.148.410)	224.647.050
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi:		
Penyusutan aset tetap	99.562.523	62.542.196
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	-	-
Kredit	25.840.716	7.750.000
Amortisasi:		
Aset tidak berwujud	-	-
Provisi dan Administrasi	36.999.380	(34.865.055)
PERUBAHAN ASET DAN KEWAJIBAN OPERASI		
Penempatan Pada Bank Lain	(1.166.769.676)	(4.326.078)
Pendapatan Bunga Yang akan Diterima	1.044.200	(15.899.734)
Kredit Yang Diberikan	(3.945.024.813)	1.585.615.971
Pendapatan Bunga Ditangguhkan	(6.008.698)	6.176.190
Aset Lain-Lain	7.056.845	(72.052.170)
Kewajiban Segera	(56.801.567)	93.733.024
Utang Bunga	17.062.846	(3.918.051)
Utang Pajak	(3.823.534)	(2.968.345)
Simpanan		
Tabungan	128.841.306	(756.264.080)
Deposito Berjangka	1.190.000.000	(519.000.000)
Simpanan dari Bank Lain	3.811.035.187	(676.380.356)
Kewajiban Imbalan Kerja	44.250.000	80.568.750
Kewajiban Lain-Lain	(37.912.675)	1.164.600
Arus kas neto dari aktivitas operasi	116.203.630	(23.476.088)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan Aset Tetap dan Inventaris	(56.798.530)	13.752.788
Pembelian/penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-
Arus kas neto untuk aktivitas investasi	(56.798.530)	13.752.788
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan-pembulatan	-	-
Arus kas neto untuk aktivitas pendanaan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	59.405.100	(9.723.300)
Kas pada Awal Periode	35.524.000	45.247.300
Kas pada Akhir Periode	94.929.100	35.524.000
	59.405.100	(9.723.300)

1. Opini Akuntan Publik

Laporan Keuangan PT BPR Bhakti Riyadi tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Akuntan Publik (AP) M.Yudhika Elrifi, M.Sc.Ak,CA,BKP,CPA,CFrA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto Dan Yudhika, dengan opini yaitu laporan keuangan PT BPR Bhakti Riyadi menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca PT BPR Bhakti Riyadi tanggal 31 Desember 2023, laporan laba rugi dan perubahan ekuitas serta arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) PA BPR di Indonesia.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, PT BPR Bhakti Riyadi mengacu pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) PA BPR di Indonesia sebagai basis penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan oleh perseroan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a) Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

Perseroan memilih menerapkan SAK ETAP yang merupakan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia yang mewajibkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan efektif tahun buku 1 Januari 2010. Peraturan yang mewajibkan Perusahaan menyusun berdasarkan SAK ETAP termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/37 DKBK tentang Penetapan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

b) Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Laporan Keuangan tahun 2023 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2022 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

c) Periode Akuntansi

Sesuai dengan Akta Pendirian, tahun buku Perseroan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 disajikan kembali sebagai pembandingan dan berdasarkan SAK ETAP.

d) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2023 berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR). Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan mata uang valas dijabarkan dalam mata uang rupiah penuh.

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

e) Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

f) Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

g) Penempatan Pada Bank lain

Penempatan pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum. Penempatan pada Bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan

h) Kredit Yang Diberikan

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Nilai buku awal kredit yang diberikan diakui sebesar pokok kredit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR.

i) Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

j) Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang biasanya terjadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya.

- 2) Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua entitas tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu.
- 3) Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor.

a) Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

- 1) Kredit :
 - a) Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.
 - b) Penghapusbukuan Kredit (Hapus Buku) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur. Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.
- 2) Penempatan pada bank lain :

Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas tabungan atau deposito tersebut disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari tabungan atau deposito tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).

a) Aset Tetap

- i. Pencatatan Aset Tetap

Aset tetap dibukukan menurut harga perolehan dengan metode garis lurus.
- ii. Penyusutan Aset Tetap

Metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dengan mempertimbangkan kelompok dan golongan serta masa manfaatnya. Kelompok, golongan dan prosentase perhitungan penyusutan Aset tetap adalah sebagai berikut:

Gedung

Bangunan : 5 % per tahun dari nilai perolehan

Kendaraan

Roda 2 (Dua) : 25 % per tahun dari nilai perolehan

Roda 4 (Empat) : 12,5 % per tahun dari nilai perolehan

Inventaris Kantor

Golongan I : 25 % per tahun dari nilai perolehan

Golongan II : 12,5 % per tahun dari nilai perolehan

iii. **Pemberhentian Aset Tetap**

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan Laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat serta akumulasi penyusutan dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan Laba atau Rugi yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan atau beban pada tahun yang bersangkutan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing – masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan.

b) Aset Lain – lain

Aset lain – lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dikelompok aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

c) Kewajiban Segera

Kewajiban segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional Bank, baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain.

d) Utang Bunga

Utang bunga merupakan pos yang dimaksudkan untuk menambah kewajiban Bank yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas terkait dengan fungsi Bank.

e) Utang Pajak

Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan Bank setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak bayar dimuka.

f) Simpanan

Simpanan tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban Bank kepada pemilik tabungan, sedangkan Deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Bank tidak melakukan penyisihan penghapusan terhadap deposito.

g) Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban Bank kepada bank lain, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.

h) Pinjaman Diterima

Pinjaman diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan.

i) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Permodalan PT BPR BHAKTI RIYADI sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 3.015.000.000,00.

j) Pendapatan dan Biaya Bunga

Bank mengakui pendapatan dan biaya atas dasar *Accrual Basis*. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang diklasifikasikan sebagai “ *Non Performing* ” tidak diakui dalam akun sampai saat diterimanya pembayaran. Bunga atas aktiva produktif “ *Non Performing* ” dimasukkan dalam rekening administrasi.

k) Pendapatan Provisi

Pendapatan Provisi Bank yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diakui pada saat realisasi pembayaran dan diamortisasi sesuai dengan umur kredit.

l) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional berasal dari kegiatan diluar kegiatan utama operasional Bank. Misal keuntungan atas penjualan aset.

m) Beban Non Operasional

Beban Non Operasional merupakan semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan kegiatan utama Bank. Misal kerugian atas penjualan aset.

n) Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

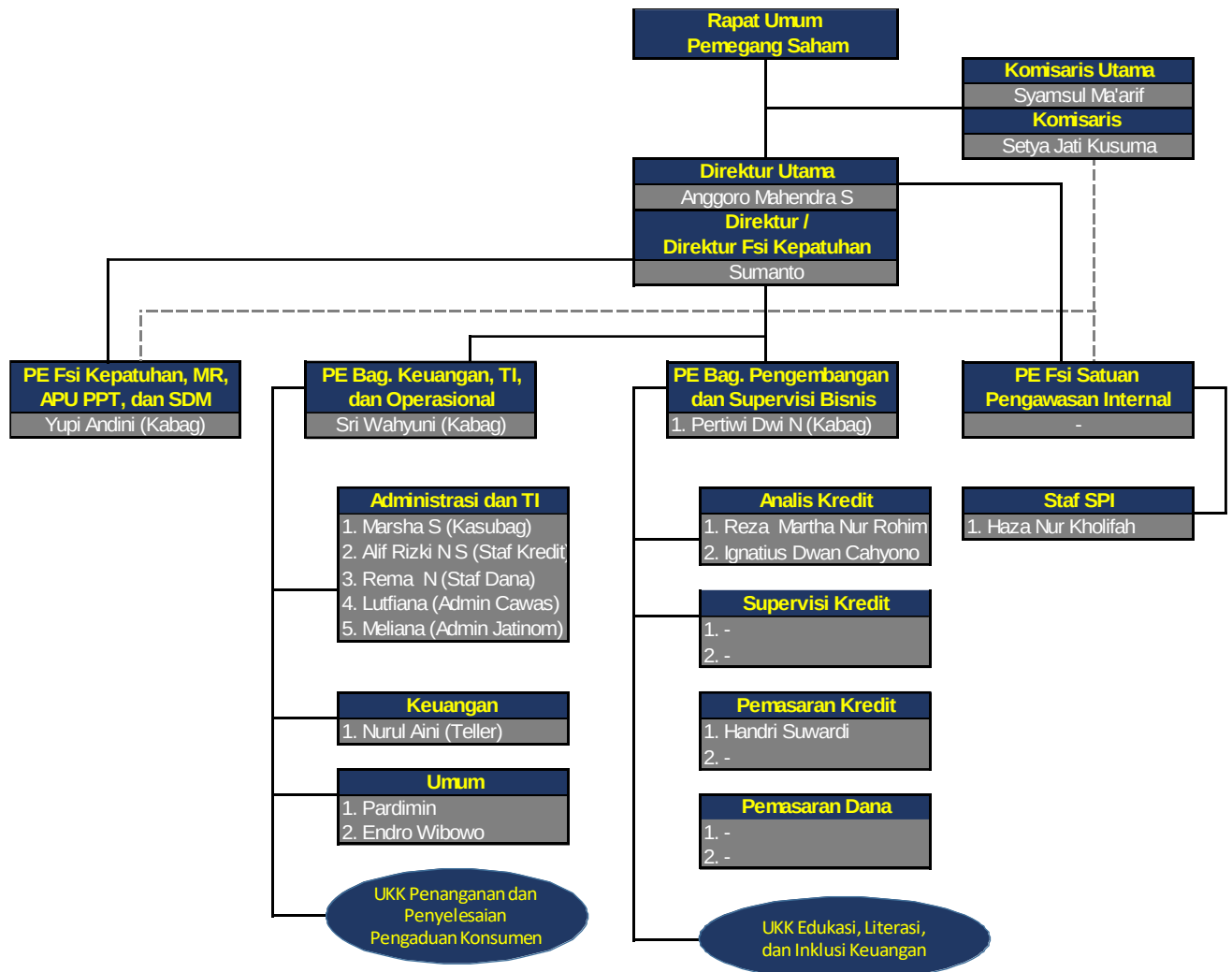
o) Pembagian Laba

Laba/rugi operasional dan laba/rugi bersih per saham dihitung dengan membagi rugi operasional dan laba/rugi bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar pada masing-masing tahun.

BAB V
LAPORAN MANAJEMEN

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT BPR Bhakti Riyadi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



2. Bidang Usaha

Sesuai Anggaran Dasar, Perseroan berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat, dengan kegiatan usaha utama sebagai berikut :



3. Teknologi Informasi

Peran Teknologi Informasi (TI) dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.

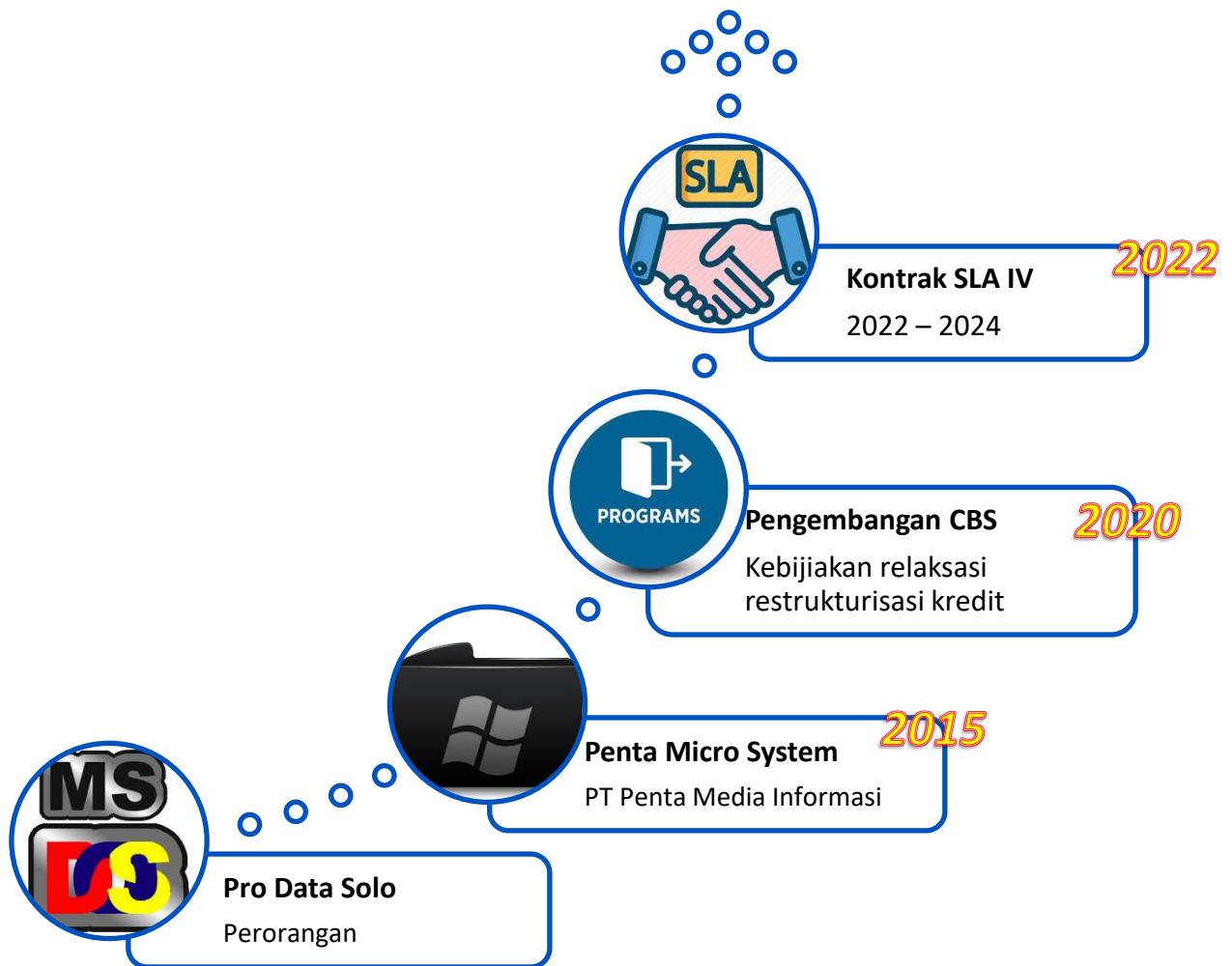
Bank menyadari kemajuan TI telah mendorong perubahan dari struktur hirarki ke *networking* hingga keluar batas-batas wilayah internal suatu organisasi bisnis. Bagi Bank, penggunaan TI selain menciptakan proses otomasi dan disintermediasi, juga terjadi proses integrasi baik dalam piranti perangkat lunak dan perangkat keras, masukan (*database*) dan keluaran (*information*), proses (antara penggunaan *database* dan sarana telekomunikasi meliputi data teks dan sarana telekomunikasi meliputi data teks dan suara melalui jaringan komunikasi digital). Penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional internal Bank, juga bertujuan memberikan produk layanan yang mudah, cepat, dan aman bagi nasabah dalam bertransaksi. Laju tersebut pun

dipercepat dengan adanya pandemi Covid-19 yang memaksa nasabah Bank untuk melakukan transaksi keuangan secara digital.

Perkembangan TI mendorong Bank menerapkan strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa seperti *online system* yang memungkinkan nasabah dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor Bank. Bank terus berbenah diri meningkatkan pengelolaan di bidang teknologi dengan penataan dan penambahan perangkat lunak dan perangkat keras, infrastruktur, pengembangan aplikasi layanan sesuai kebutuhan unit bisnis, regulasi dan tren teknologi, peningkatan tata kelola dan penerapan manajemen risiko TI. Bank telah mengubah secara bertahap pelayanan transaksi yang berbasis teknologi dengan tatap muka yang lebih mudah (*user-friendly*). Pemanfaatan TI yang handal akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai bidang dalam rangka mewujudkan penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Dengan penerapan yang terintegrasi dengan strategi bisnis serta dukungan SDM yang kompeten, maka TI diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan bisnis bank yang semakin kompleks.

Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan *electronic banking (e-banking)* misalnya melalui ATM, *mobile banking* dan *internet banking*, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankanpun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah, yang mana tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu/nasabah datang langsung ke kantor cabang yang disediakan oleh bank yang di gunakan untuk menabung/investasi menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet maupun dengan *mobile banking* sudah banyak diterapkan bank.

Pada tahun 2015 lalu, PT BPR Bhakti Riyadi telah mengganti *core banking system (CBS)* dari sistem sebelumnya yang berbasis MS-DOS dengan sistem yang berbasis Windows, yaitu Penta Micro System dari vendor PT Penta Media Informasi. Bank juga telah memiliki *Service Level Agreement (SLA)* dengan PT Penta Media Informasi untuk pemeliharaan dan pengembangan CBS, dengan kontrak SLA keempat kalinya di tahun 2022 untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun ke depan (2022 – 2024). Pengembangan aplikasi CBS juga memungkinkan sistem Bank untuk berkomunikasi dengan sistem lain yang dapat memperluas jangkauan layanan Bank dan menyesuaikan dengan kondisi eksternal terkini.



4. Perkembangan Ekonomi dan Target Pasar

a. Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu wilayah. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan setiap sektornya. Hal ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan serta berguna pula untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Kondisi perekonomian global ditahun 2023 masih belum menggembirakan. Dengan akibat dari pandemi Covid-19 yang masih berimbas sampai dengan saat ini dan berbagai kebijakan untuk menahan dampaknya telah menyebabkan ekonomi global dalam kontraksi sangat parah. Hal tersebut masih ditambah dengan ketidakpastian perekonomian global memberikan dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor, khususnya di sektor ekonomi. Keterbatasan suplai yang terjadi selama pandemi dan diikuti dengan gangguan rantai pasokan yang membuat gejolak besar pada kondisi ekonomi dunia.

b. Perekonomian Nasional**1) Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai kisaran 4,5-5,3%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh peningkatan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,23% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, terkendalinya inflasi, dan dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara. Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi sebesar 10,62% (yoy), terutama didorong oleh belanja pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 4,63% (yoy), didorong terutama oleh perbaikan investasi nonbangunan yang tecermin dari membaiknya pertumbuhan impor barang modal. Selain itu, investasi bangunan juga tumbuh positif seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Namun demikian, ekspor secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar 2,75% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan pelemahan ekonomi global, di tengah ekspor jasa yang tumbuh kuat didukung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan II 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2023 yang tinggi tercatat di sebagian besar wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

2) Inflasi

Dari sisi inflasi, angka inflasi menunjukkan perubahan harga secara umum atau kelompok pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi pada September 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2023 tercatat sebesar 0,19% (mtm),

sehingga secara tahunan menjadi 2,28% (yoy), lebih rendah dari inflasi IHK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,27% (yoy). Inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Inflasi inti tetap terjaga rendah. Inflasi inti pada September 2023 tercatat sebesar 0,12% (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,13% (mtm). Perkembangan tersebut terutama disumbang oleh inflasi tarif pulsa ponsel dan biaya kuliah akademi/ perguruan tinggi. Secara tahunan, inflasi inti September 2023 tercatat sebesar 2,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 2,18% (yoy). Inflasi kelompok *volatile food* meningkat. Kelompok *volatile food* pada September 2023 mencatat inflasi sebesar 0,37% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang deflasi sebesar 0,51% (mtm). Perkembangan tersebut terutama disumbang oleh inflasi pada komoditas beras dan daging sapi. Sementara itu, peningkatan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi telur ayam ras, aneka bawang, dan aneka cabai. Secara tahunan, kelompok *volatile food* mengalami inflasi sebesar 3,62% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,42% (yoy). Inflasi kelompok *administered prices* tercatat lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kelompok *administered prices* pada September 2023 mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,02% (mtm). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh inflasi bensin dan rokok kretek filter akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan berlanjutnya transmisi kenaikan tarif cukai tembakau. Sementara itu, peningkatan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi tarif angkutan udara seiring dengan normalisasi harga setelah berakhirnya periode libur sekolah. Secara tahunan, inflasi kelompok *administered prices* terus menurun menjadi 1,99% (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 8,05% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh berakhirnya *base effect* penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun lalu.

3) Kredit

Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan I 2023 tumbuh positif dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kredit baru sebesar 63,7%. Pertumbuhan kredit baru tersebut terjadi pada seluruh jenis kredit. Pada triwulan II 2023, penyaluran kredit baru diperkirakan tumbuh lebih tinggi, terindikasi dari SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 99,7%. Standar penyaluran kredit pada triwulan II 2023 diperkirakan sedikit lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari Indeks *Lending*

Standard (ILS) positif sebesar 0,1%. Kebijakan penyaluran kredit diperkirakan lebih ketat, antara lain pada aspek suku bunga kredit, premi kredit berisiko, dan persyaratan administrasi. Hasil survei menunjukkan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit ke depan. Responden memprakirakan pertumbuhan kredit untuk keseluruhan tahun 2023 sebesar 10,4% (yoy), tumbuh positif meski tidak setinggi realisasi pertumbuhan kredit pada 2022 sebesar 11,4% (yoy). Optimisme tersebut antara lain didorong oleh kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit. Survei Perbankan yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan II 2023 meningkat dibanding periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru triwulan II 2023 sebesar 94,0%, lebih tinggi dari 63,7% pada triwulan sebelumnya (Grafik 1). Peningkatan permintaan kredit baru pada triwulan II 2023, relatif stabil dibanding periode yang sama tahun 2022. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit baru yang meningkat terjadi pada hampir seluruh jenis kredit. Hal tersebut terindikasi pada kredit modal kerja (SBT 89,5%) dan kredit konsumsi (SBT 85,3%). Sementara itu, kredit investasi (SBT 54,4%) terindikasi sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Selanjutnya, kredit baru untuk seluruh jenis kredit konsumsi tumbuh lebih tinggi pada triwulan II 2023 dibanding triwulan sebelumnya. Secara sektoral, pertumbuhan penyaluran kredit baru terutama terjadi pada sektor Konstruksi (SBT 82,2%), diikuti oleh sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (SBT 79,5%), dan sektor Industri Pengolahan (SBT 77,9%). Secara triwulanan (qtq), penyaluran kredit baru pada triwulan III 2023 diperkirakan tumbuh positif. Hal ini terindikasi dari SBT prakiraan permintaan kredit baru triwulan III 2023 sebesar 86,3%, tetap bernilai positif meski lebih rendah dibandingkan 94,0% pada triwulan sebelumnya (Grafik 1). Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada triwulan III 2023 adalah kredit modal kerja, diikuti oleh kredit investasi dan kredit konsumsi. Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran kredit kepemilikan rumah/apartemen masih menjadi prioritas utama, diikuti oleh kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor. Berdasarkan sektor, penyaluran kredit baru pada triwulan III 2023 diprioritaskan pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar & Eceran, serta sektor Perantara Keuangan (Tabel 3). Kebijakan penyaluran kredit triwulan III 2023 diperkirakan sedikit lebih ketat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kebijakan Penyaluran Kredit Kebijakan penyaluran kredit pada triwulan III 2023 diperkirakan sedikit lebih ketat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) triwulan III 2023 yang bernilai positif sebesar 0,1%. Standar penyaluran kredit yang lebih ketat dibandingkan triwulan sebelumnya diperkirakan terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali KPR/KPA yang diperkirakan lebih longgar. Sementara itu, aspek kebijakan penyaluran kredit yang diperkirakan lebih ketat dibandingkan triwulan sebelumnya antara lain suku bunga kredit dan premi kredit berisiko.

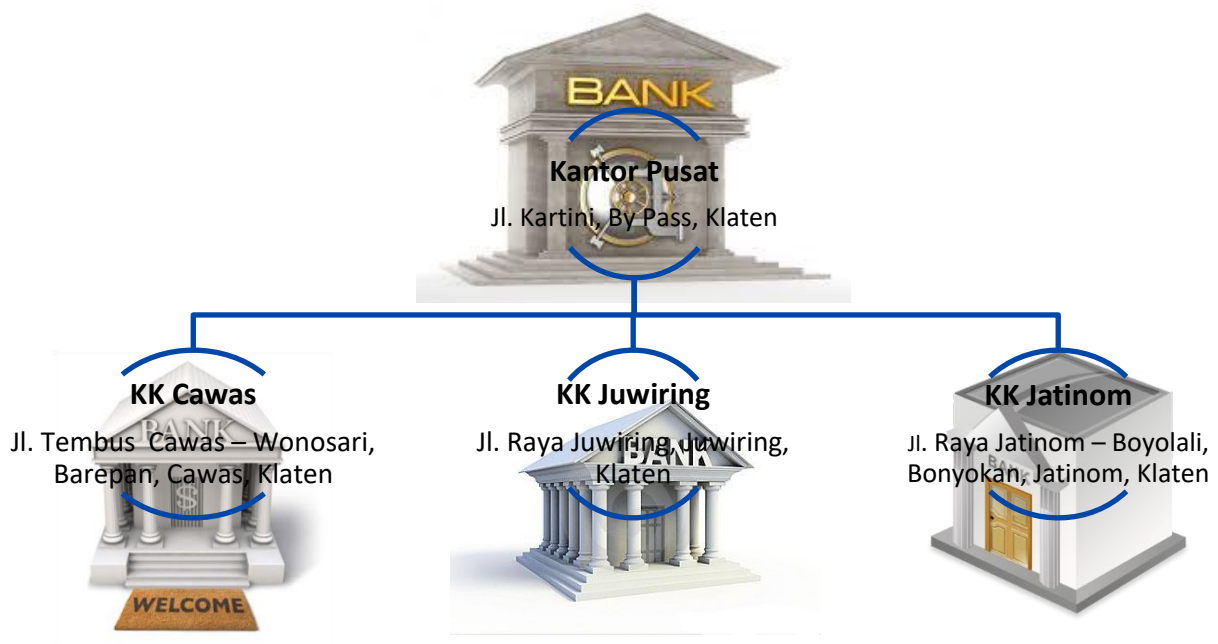
4) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan III 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terlihat dari SBT pertumbuhan DPK sebesar 55,0%, lebih tinggi dibandingkan 47,6% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan DPK yang meningkat diperkirakan terjadi pada jenis instrumen deposito, dengan SBT yang lebih tinggi dari periode sebelumnya, yaitu sebesar 39,2%. Sementara itu, pertumbuhan tabungan diperkirakan tetap tumbuh positif meski melambat dengan SBT sebesar 79,0%. Di sisi lain, giro diperkirakan membaik meski tumbuh negatif, terindikasi dari SBT negatif sebesar -9,1%. Pertumbuhan DPK sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan masih tinggi. Hal ini tecermin dari SBT prakiraan penghimpunan DPK tahun 2023 yang tercatat positif sebesar 94,3%, lebih tinggi dibandingkan SBT 82,1% pada tahun sebelumnya.

5. Jaringan Kantor

Demi merespon perubahan yang besar di industri perbankan, baik dalam ranah lokal maupun global, sekaligus menjawab kebutuhan yang muncul karena pertumbuhan internal dan untuk mendukung visi perusahaan, PT BPR Bhakti Riyadi berupaya keras untuk memperbaiki seluruh aspek layanannya. Bank sangat menyadari perlunya penyebaran jaringan secara luas dan merata untuk mendorong perekonomian regional di Kabupaten Klaten. Selain itu perluasan jaringan kantor juga dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi nasabah untuk memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan lebih mendekatkan diri kepada nasabah. Kebijakan pengembangan jaringan kantor dengan membuka kantor kas baru atau merelokasi kantor kas yang ada sekarang di pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Klaten ini akan terus dilaksanakan dimasa mendatang mengingat masih banyak wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan perbankan yang besar namun belum ter-cover oleh layanan Bank.

Hingga akhir Desember 2023, jaringan kantor PT BPR Bhakti Riyadi masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat dan 3 (tiga) Kantor Kas sebagai berikut :



6. Kerjasama BPR

Dalam rangka pengembangan usaha, PT BPR Bhakti Riyadi juga bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya dalam bentuk Penempatan Dana Deposito. Hingga akhir Desember 2023, kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerja yaitu :

Deposito

No.	Instansi	Bentuk	Nominal Penempatan (Rp)	Jangka Waktu	Suku Bunga (%)
1	Bank Jateng	ABA Deposito	30,000,000	1	4.25
2	Bank Danamon	ABA Deposito	450,000,000	1	2.5
3	BPR Saribumi	ABA Deposito	500,000,000	3	6.75
4	BPR Saribumi	ABA Deposito	300,000,000	6	6
TOTAL - ABA			1,280,000,000		
1	Bank Jateng	ABP Deposito	300,000,000	12	6.75
2	BPR Gunung Mas	ABP Deposito	700,000,000	6	6.75
3	BPR Gunung Mas	ABP Deposito	400,000,000	6	6.75
4	BPR Karangmalang	ABP Deposito	300,000,000	6	6.75

5	BPR Karangmalang	ABP Deposito	500,000,000	6	6.75
6	BPR Hardi Mas Mandiri	ABP Deposito	500,000,000	6	6.75
7	BPR Antar Rumeksa Artha	ABP Deposito	250,000,000	6	6.75
8	BPR Antar Rumeksa Artha	ABP Deposito	250,000,000	6	6.75
9	BPR Gajah Mungkur	ABP Deposito	500,000,000	6	6.75
10	KBPR Bank Pasar Patma	ABP Deposito	500,000,000	3	6.75
11	BPR Shinta Bhakti Wedi	ABP Deposito	300,000,000	3	6.75
12	BPR Shinta Bhakti Wedi	ABP Deposito	200,000,000	3	6.75
TOTAL - ABP			4,700,000,000		

7. Sumber Daya Manusia

PT BPR Bhakti Riyadi selalu memberikan perhatian maksimal atas perkembangan dan pengembangan sumber daya internal perusahaan, dalam hal ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Bagi Bank, SDM merupakan aset terpenting bagi perusahaan yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan kompetensi, loyalitas, dan kesejahteraannya. PT BPR Bhakti Riyadi menyadari bahwa pertumbuhan maksimal Bank diawali dengan manajemen yang baik atas SDM. Untuk itu pada tahun 2023, Bank menyiapkan berbagai kebijakan yang menjadi fokus pelaksanaan meliputi :



Sistem Manajemen Talenta

- Implementasi Sistem Manajemen Talenta secara bertahap agar pegawai dapat memahami dan mengikuti dengan baik



Sistem Kompensasi Berbasis Kompetensi

- Penyusunan Sistem Kompensasi Berbasis Kompetensi yang diharapkan mendorong kinerja pegawai



Program Pendidikan dan Pelatihan

- Meningkatkan kompetensi Pengurus dan Pegawai melalui Program Pendidikan dan Pelatihan secara berkala dan berkelanjutan

PT BPR Bhakti Riyadi dengan segala perencanaan dan prinsip kehati-hatian percaya bahwa dimasa yang akan datang, PT BPR Bhakti Riyadi akan tumbuh besar dan membanggakan. Untuk itu, PT BPR Bhakti Riyadi memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh SDM untuk mendukung pertumbuhan tersebut dari dalam. Tidak ada diskriminasi baik dari status kepegawaian, jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Semua insan perusahaan diperlakukan sama baiknya sebagaimana organ inti perusahaan. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk berkompetisi, berkarya, berkembang, promosi, dan hak fasilitas sesuai fungsi yang telah dipertimbangkan kebijakannya.

Sebagai pelaksanaan kebijakan jenjang karir (*career path*), terdapat 2 (dua) kategori status kepegawaian di PT BPR Bhakti Riyadi yaitu Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Pegawai Tetap adalah pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), misal pegawai kontrak dan *outsourcing*. Dalam sistem kepegawaian PT BPR Bhakti Riyadi, Pegawai Tidak Tetap akan selalu dilibatkan dalam pengembangan dan diperhatikan dalam peningkatan jabatan menjadi Pegawai Tetap dengan ketentuan telah bekerja di PT BPR Bhakti Riyadi minimal selama 1 (satu) tahun dan telah lulus seleksi atau penilaian kinerja menjadi Pegawai Tetap.

Sejak tahun 2016 lalu telah mulai diterapkan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi dalam pengelolaan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Sampai dengan bulan Desember 2023, Bank didukung dengan SDM berjumlah 21 (dua puluh satu) Pegawai dan Pengurus. Jumlah ini sama dengan akhir tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Jabatan	Jumlah	
	31 Desember 2022	31 Desember 2023
Dewan Komisaris	2 Orang	2 Orang
Direksi	2 Orang	2 Orang
Pegawai Pimpinan	4 Orang	4 Orang
Pegawai Staf	13 Orang	13 Orang
Total	21 Orang	21 Orang

Mewujudkan visi menjadi Bank yang terpercaya dan pilihan masyarakat di Kabupaten Klaten, PT BPR Bhakti Riyadi memberikan perhatian khusus atas pengembangan pegawai, terutama dalam pengembangan pendidikan pegawai. Pada tahun 2023 jumlah

pegawai mayoritas terdiri dari tingkat pendidikan sarjana, hal ini sesuai dengan target kebijakan manajemen terkait mempersiapkan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi unggul.

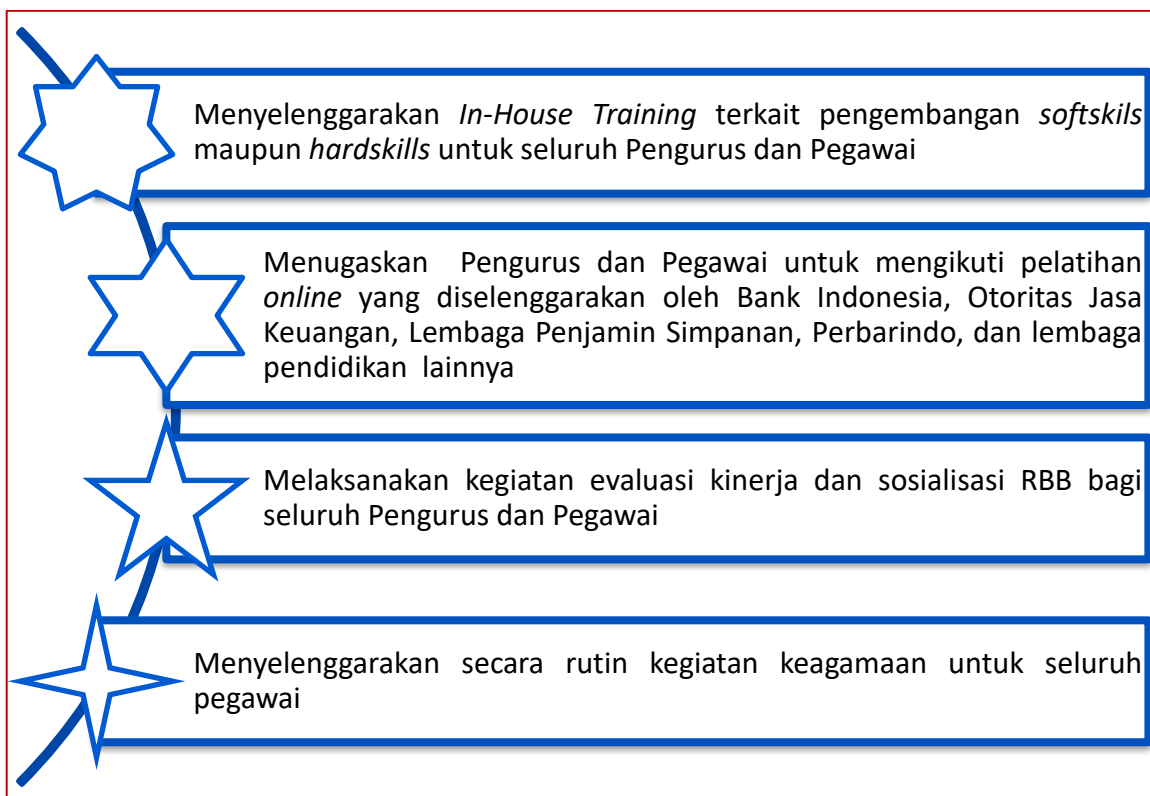
Adapun tingkat/ jenjang pendidikan dari SDM tersebut terdiri dari :

Jabatan	Jumlah	
	31 Desember 2022	31 Desember 2023
Sarjana (S1/ S2)	16 Orang	16 Orang
Diploma	1 Orang	2 Orang
Sekolah Menengah	4 Orang	3 Orang
Total	21 Orang	21 Orang

PT BPR Bhakti Riyadi memberikan *treatment* bagi pegawai sebagai modal yang terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja perusahaan. Upaya meningkatkan kinerja Bank memerlukan SDM yang profesional dan tangguh, dimana Pengembangan SDM yang handal dan berkualitas merupakan komitmen tertinggi Bank dalam rangka mendukung peran dan kontribusi SDM secara optimal untuk mewujudkan strategi dan target usaha Bank. Bank memandang bahwa SDM merupakan aset utama perusahaan, sehingga senantiasa menjadi prioritas dalam pengelolaannya. Dan karenanya, Bank secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian pada sistem dan prosedur SDM.

Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pendidikan profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, seminar, lokakarya, dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank. Sebagian besar pelatihan yang dilakukan melibatkan pihak luar Bank (Perbarindo, OJK, BI, LPS, PPATK, dan lainnya) dilakukan secara daring (*virtual*) maupun luring.

Beberapa diantaranya adalah :



8. Kepemilikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Pemegang saham yang masuk dalam susunan kepengurusan Perseroan adalah Saudara Syamsul Ma'arif dan Saudara Setya Jati Kusuma yang menjabat selaku anggota Dewan Komisaris PT BPR Bhakti Riyadi, sebagaimana tabel berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase
Dewan Komisaris			
Syamsul Ma'arif	Komisaris Utama	466 lembar	1,55 %
Setya Jati Kusuma	Komisaris	3.256 lembar	10,80 %
Direksi			
Anggoro Mahendra Setyawan	Direktur Utama	0 lembar	0 %
Sumanto	Direktur	0 lembar	0 %

9. Hubungan Keterkaitan

Keterkaitan Antar Pemilik, Antar Pengurus, dan Antara Pemilik dengan Pengurus PT BPR Bhakti Riyadi hingga derajat kedua adalah sebagai berikut :



10. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas

Kebijakan Pemberian remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS, yang mana kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Bagi Dewan Komisaris diberikan Honorarium yang besarnya $\pm 45\%$ dari Gaji Direksi. Sementara bagi Direksi diberikan Gaji, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi, dan Tunjangan Transport.

Dengan pertimbangan bahwa Bank saat ini sedang memasuki tahap percepatan pertumbuhan aset, maka segala bentuk fasilitas kepada pengurus seperti bonus, *tantiem*, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya belum diberikan kepada pengurus.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Rasio gaji yang tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan sebagai berikut :



11. Perubahan Penting Lainnya

Sepanjang tahun 2020 belum ada penambahan Modal Disetor dan tidak ada perubahan komposisi kepemilikan saham PT BPR Bhakti Riyadi. Pemegang Saham melakukan perubahan komposisi Modal Disetor Perseroan. Susunan dan komposisi pemegang saham masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu :

No.	Nama Pemilik	Jumlah		
		Lembar	Nominal	%
1	Setya Jati Kusuma	3.256	Rp. 325.600.000,-	10,80
2	August Deva Widyasatma	500	Rp. 50.000.000,-	1,66
3	Djoko Sutrisno	5.000	Rp.500.000.000,-	16,58
4	Emy Damayanti. R (Pemegang Saham Pengendali)	11.250	Rp. 1.125.000.000,-	37,31
5	Bagus Prihartanto	2.500	Rp. 250.000.000,-	8,29
6	Hermawan Budi Susetya	1.000	Rp. 100.000.000,-	3,32
7	Sri Widayati	417	Rp.41.700.000,-	1,38
8	Indrawati Hartono	3.211	Rp.321.100.000,-	10,65

9	Fairuzaqona Ulfaty	1.000	Rp.100.000.000,-	2,32
10	Wawan Ari Wibowo	750	Rp.75.000.000,-	2.49
11	Grantika	500	Rp.50.000.000,-	1,66
12	Dian Ririt Dewayanti	150	Rp.15.000.000,-	0,50
13	Hayuditia Ansita Perdana	50	Rp.5.000.000,-	0,17
14	Haenis Gunarto	100	Rp.10.000.000,-	0,33
15	Syamsul Ma'arif	466	Rp.46.600.000,-	1,55
Total		30.150	Rp.3.015.000.000,-	100,00

Susunan dan komposisi Pemegang Saham tersebut telah tertuang dalam Akta Pernyataan RUPSLB PT BPR Bhakti Riyadi tanggal 29 Juni 2020 yang dicatatkan di notaris Satryo Aji, S.H., M.Kn, Notaris di Klaten, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 2 Juli 2020, Nomor AHU-AH.01.03-0271495 dan Nomor AHU-AH.01.03-0271500 serta Daftar Perseroan Nomor AHU-0104774.AH.01.11 tahun 2020, serta telah dicatat dalam administrasi pengawasan bank di OJK melalui surat No. S-245/KO.03012/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham.



PT. BPR BHAKTI RIYADI



BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Usaha BPR

Sepanjang tahun 2023, PT BPR Bhakti Riyadi telah merealisasikan beberapa kebijakan dan strategi pengembangan perusahaan, baik yang terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan daya dukung operasional, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur serta pengembangan jaringan pemasaran/pasar. PT BPR Bhakti Riyadi juga secara bertahap dan konsisten mengimplementasikan prinsip pengendalian/ manajemen resiko, Tata Kelola Perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance* (GCG), dan senantiasa menjalin kemitraan secara eksternal, baik terhadap lembaga keuangan sejenis maupun masyarakat sekitar melalui penerapan edukasi dan literasi keuangan.

a. Penguatan Institusi Internal

Secara internal, PT BPR Bhakti Riyadi selalu melakukan upaya-upaya konkrit pengembangan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi dan penguatan visi dan misi perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam RBB 2023, PT BPR Bhakti Riyadi telah menjalankan langkah-langkah sebagai berikut :



Penyempurnaan struktur organisasi berdasarkan prioritas guna peningkatan daya saing organisasi



Manajemen aset, membuat lingkungan kerja yang sehat, nyaman & aman, penyesuaian sarana & prasarana operasional



Melaksanakan perubahan budaya kerja, pola pikir dan perilaku SDM Bank dengan pendekatan sistem integrasi perencanaan strategis, anggaran & manajemen kinerja.



Melaksanakan upaya – upaya pengendalian internal berupa pencegahan kerugian Bank dan penindakan secara tegas terhadap kasus – kasus tindak kecurangan (*fraud*) di Bank.

b. Pengembangan Daya Dukung Fasilitas

Kebijakan ini antara lain direalisasikan dalam bentuk penguatan teknologi sistem informasi melalui proses, SDM, dan teknologi yang cukup sesuai dengan efektif dan efisien, dengan rincian sebagai berikut :



Penyempurnaan *core banking system* dengan ketentuan dan sistem pelaporan terkini dari regulator



Melakukan pelatihan dibidang teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan kompetensi SDM



Optimalisasi *Corporate Website* untuk menambah akses informasi kepada masyarakat dan *Penta Mobile Collection* meningkatkan keamanan bertransaksi.



Peningkatan *hardware* dan *software* TSI yang memenuhi ketentuan regulasi dan kebutuhan bisnis

Perkembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) mendorong PT BPR Bhakti Riyadi menerapkan strategi bisnis dengan menempatkan TSI sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. PT BPR Bhakti Riyadi senantiasa berupaya meningkatkan pengelolaan di bidang TSI dengan penataan dan penambahan perangkat keras dan infrastruktur, pengembangan aplikasi *core banking system* sesuai kebutuhan unit bisnis, regulasi dan tren teknologi, peningkatan tata kelola dan penerapan manajemen risiko.

c. Pengembangan Jaringan Kantor

Demi merespon perubahan yang pesat di industri perbankan, baik dalam ranah lokal maupun global, sekaligus menjawab kebutuhan yang muncul karena pertumbuhan internal dan untuk mendukung visi perusahaan, PT BPR Bhakti Riyadi berupaya keras untuk memperbaiki seluruh aspek layanannya. Bank sangat menyadari perlunya penyebaran jaringan secara luas dan merata untuk mendorong perekonomian regional. Selain itu perluasan jaringan juga dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi nasabah untuk memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan.

Namun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan fokus Bank untuk membenahi budaya kerja dan perbaikan kinerja bisnis, maka sepanjang tahun 2023 tidak dilakukan penambahan jumlah jaringan kantor. Kebijakan pengembangan jaringan kantor dengan membuka kantor kas baru di pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Klaten ini akan dilaksanakan dimasa mendatang mengingat masih banyak

wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan perbankan yang besar namun belum ter-cover oleh layanan PT BPR Bhakti Riyadi.

d. Penguatan Kerjasama Eksternal

PT BPR Bhakti Riyadi terlibat secara aktif pada berbagai kegiatan organisasi dan asosiasi guna pengembangan perusahaan, khususnya kegiatan yang terkait dengan program Perbarindo, baik di tingkat PAC Klaten, Solo Raya maupun Jawa Tengah. PT BPR Bhakti Riyadi juga senantiasa berupaya optimal untuk memperluas hubungan dengan rekan kerja, regulator, maupun mitra bisnis terkait guna meningkatkan kinerja Bank. Di samping itu PT BPR Bhakti Riyadi juga membangun kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan yang menjadi mitra kerja dalam rangka pengembangan bisnis Bank, diantaranya Apex Bank Jateng dan menjalin aliansi strategis dengan bank umum untuk melahirkan produk dan layanan baru seperti kerjasama pembayaran tagihan secara elektronik.

e. Strategi Pemasaran

Sepanjang tahun 2023, arah strategi dan aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh PT BPR Bhakti Riyadi untuk meningkatkan portofolio dana dan kredit pada segmen UMKM adalah sebagai berikut :



1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT BPR Bhakti Riyadi menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan proses jangka panjang yang akan menghasilkan *sustainable value*, sehingga Bank muntlak memerlukannya untuk menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan sehingga PT BPR Bhakti Riyadi mampu beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karenanya, PT BPR Bhakti Riyadi terus berupaya optimal untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang sesuai guna mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan, dan *prudential banking*.

Sebagai institusi yang bergerak di bidang perbankan, dalam melakukan implementasi tata kelola perusahaan, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sendiri dilakukan secara menyeluruh di segala level organisasi dan aspek operasi serta didukung penuh oleh segenap insan Bank. Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bank telah menerapkan **TARIF** sebagai 5 pilar dasar dari tata kelola perusahaan yang baik, seperti yang diuraikan sebagai berikut

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik



Transparansi atau **Keterbukaan** mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.



Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai lembaga kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada *stakeholder*.



Responsibilitas atau **Pertanggungjawaban** mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BPR serta tanggung jawab BPR terhadap masyarakat dan lingkungan.



Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen.



Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. BPR harus memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya secara adil.

Disadari bahwa upaya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik perlu dilakukan secara terarah dan terencana sesuai standar *best practice* atau standar terbaik dalam mendukung pencapaian tujuan Bank. Aktualisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT BPR Bhakti Riyadi dilakukan sejalan dengan ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Perkreditan Rakyat di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Saat ini PT BPR Bhakti Riyadi berada pada penguatan program untuk menjadi perusahaan dengan tata kelola yang baik melalui penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif. Selama tahun 2023, upaya yang dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain sebagai berikut :

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

- 1) Sampai dengan akhir bulan Desember 2023, jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi masih tetap sama serta telah memenuhi ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditetapkan, yaitu Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan Direksi berjumlah 2 (dua) orang.

Jabatan	Nama Pengurus
Direktur Utama	Anggoro Mahendra Setyawan
Direktur / Direktur ymf Kepatuhan	Sumanto
Komisaris Utama	Syamsul Ma'arif
Komisaris	Setya Jati Kusuma

- 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memiliki sertifikasi kompetensi Dewan Komisaris atau Direksi Bank Perkreditan Rakyat yang sesuai.
- 3) Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 4) Bank telah memiliki ketentuan penerapan tata kelola perusahaan, etika dan perilaku bisnis, penanganan benturan kepentingan, dan pengendalian gratifikasi.
- 5) Bank telah memiliki pedoman kerja dan kode etik Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- 2) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- 3) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.

- 4) Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank.
 - 5) Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2023.
 - 6) Dewan Komisaris sudah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun pemeriksaan 2023.
 - 7) Dewan Komisaris memonitor tindak lanjut hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun pemeriksaan 2023 dan bersama Direksi melakukan evaluasi untuk merumuskan langkah-langkah perbaikannya.
 - 8) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Dewan Komisaris semisal mekanisme penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP), proses penghapusbukuan kredit, serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Tugas dan tanggungjawab Direksi
- 1) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *job description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
 - 2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - 3) Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - 4) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- d. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank belum membentuk komite-komite.
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.
- 1) Fungsi Kepatuhan
 - a) Bank telah mengangkat Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.

- b) Bank telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT.
- c) Bank telah menyampaikan laporan-laporan terkait kepatuhan kepada OJK selama periode Januari – Desember 2023 sebagai berikut :
 - i. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester I – 2023.
 - ii. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester I – 2023.
 - iii. Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko Semester I – 2023.
 - iv. Laporan Pelaksanaan Inklusi Keuangan Semester I – 2023.
 - v. Laporan Pelaksanaan Edukasi Keuangan Semester I – 2023.
 - vi. Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
 - vii. Laporan Rencana Pengkinian Data APU-PPT Tahun 2023.
 - viii. Laporan *Self Assesment* 2023.
 - ix. Laporan Sipesat PPATK Triwulan I, II, dan III – 2023.
 - x. Laporan Publikasi Triwulan I, II dan III Tahun 2023.
 - xi. Laporan LPS Semester I Tahun 2023.
 - xii. Laporan SIPINA Tahun 2023.
 - xiii. Laporan Rencana Kerja Audit Internal Tahun 2023.
 - xiv. Laporan Pengaduan Konsumen Triwulan I, II, dan III Tahun 2023.

2) Fungsi Audit Intern

Bank telah memiliki pedoman kerja dan kode etik SPI.

3) Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk Akuntan Publik (AP) M. Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak, CA, BKP, CPA, CFFA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto dan Yudhika sebagai auditor atas laporan keuangan PT BPR Bhakti Riyadi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pelaksanaan *General Audit* dilaksanakan pada bulan Januari 2024 baik secara *on-site* di Kantor Pusat PT BPR Bhakti Riyadi maupun komunikasi melalui sarana elektronik.

f. Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Bank wajib melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling kurang menyangkut 11 faktor secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berdasarkan pedoman pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, untuk Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan tahun 2023 didapatkan hasil perhitungan nilai

komposit mencapai sebesar 1,97. Hasil ini masih berada pada kisaran nilai komposit $1.5 \leq \text{nilai komposit} < 2.5$, sehingga predikat komposit yang diperoleh Bank adalah “Baik”. Hasil tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

2. Edukasi dan Literasi Keuangan

Sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 76/POJK.07/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tanggal 20 Juni 2017 Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, maka PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Edukasi keuangan dimaksud dilaksanakan dengan cara memberi dorongan, pemahaman dan aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru kepada kalangan yang dituju supaya memahami produk dan layanan jasa keuangan yang ada di masyarakat.

PT BPR Bhakti Riyadi sebagai salah satu PUJK yang berkedudukan di Kabupaten Klaten memiliki komitmen untuk mendukung program edukasi seperti yang diamanahkan dalam Peraturan dan Surat Edaran OJK tersebut dengan terus berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Klaten, khususnya yang berada di sekitar lokasi usaha Bank. Sasaran yang ingin diraih adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha Bank melalui program pendidikan keuangan dasar agar masyarakat dapat menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Secara lebih spesifik, kalangan masyarakat yang dituju adalah pelajar/ siswa tingkat dasar dan pelaku pemula usaha mikro, kecil dan menengah (umkm).

Selama tahun 2023, kegiatan yang dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi untuk mendukung penerapan program Edukasi dan Literasi Keuangan antara lain sebagai berikut :



EDUKASI & LITERASI PROGRAM “MENGENAL PERKREDITAN DI BPR” – PELAKU UMKM PASAR PULUH WATU – KEC. PULUH WATU – KLATEN



EDUKASI & LITERASI PROGRAM “AYOO KE BPR” – PELAKU UMKM PASAR TOTOGAN – KEC. NGAWEN – KLATEN



EDUKASI & LITERASI PROGRAM “MARI MENGENAL BPR” – PELAKU UMKM PASAR DELANGGU – KEC. DELANGGU – KLATEN



EDUKASI & LITERASI PROGRAM “BANK DAN LAYANANNYA” – SD N 2 CAWAS– KEC. CAWAS – KLATEN



EDUKASI & LITERASI PROGRAM “AYO KE BANK” – KEGIATAN PKK – KEC. JOGONALAN – KLATEN



EDUKASI & LITERASI PROGRAM “MARI MENABUNG” – SD N 2 JATEN- KEC. JUWIRING – KLATEN

3. Implementasi Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko yang konsisten merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis Bank dalam mencapai target menjadi Perusahaan yang sehat dan tumbuh secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Bank telah menerapkan manajemen risiko yang melekat pada seluruh jenjang organisasi Perusahaan melalui upaya peningkatan pemahaman dan budaya sadar risiko (*risk awareness*), serta mengefektifkan peran satuan kerja/*risk owner* sebagai *first line of defense*, dimana dalam tata kelola manajemen risiko memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko di satuan kerjanya.

Untuk mencapai tujuan diatas dan sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, perlu dibangun kesadaran dan budaya manajemen risiko terpadu (*integrated risk culture*) dan difokuskan pada efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko melibatkan semua unsur dalam Bank, terutama pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta organisasi dan fungsi yang secara langsung terkait dengan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif manajemen bank, kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank serta integrasi sistem informasi di Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank. Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko, Dewan Komisaris dan Direksi telah dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM. Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko, maka Pejabat Eksekutif tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam merumuskan kebijakan, strategi manajemen risiko termasuk penetapan limit serta memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang akan mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

Pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional ditujukan untuk mengelola risiko yang muncul dan melekat pada setiap aktivitas Bank pada level yang dapat diterima. PT BPR Bhakti Riyadi diklasifikasikan sebagai BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sehingga wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan. Bank telah mengidentifikasi dan mengelola risiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional, penyediaan likuiditas, penyaluran kredit, yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas.

a. Risiko Kredit

No.	Tipe Risiko	Mitigasi
1.	Kegagalan debitur memenuhi kewajibannya.	✓ Kebijakan pokok dalam perkreditan. ✓ Tata cara penilaian kualitas kredit. ✓ Profesionalisme dan integritas pejabat

		perkreditan Bank. ✓ <i>Four-Eyes Principles</i>. ✓ Memiliki system informasi manajemen yang bermanfaat dalam memonitor perkembangan aktivitas perkreditan. ✓ Menerapkan <i>early warning signals</i>.
--	--	--

b. Risiko Operasional

No.	Tipe Risiko	Mitigasi
1.	Ketidakcukupan/ tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.	✓ Melakukan pengkinian manual kebijakan dan pedoman operasional. ✓ Memiliki proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional Bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan/ bencana. ✓ Profesionalisme dan integritas pejabat operasional Bank.

c. Risiko Kepatuhan

No.	Tipe Risiko	Mitigasi
1.	Tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	✓ Menyusun stratetgi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan. ✓ Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. ✓ Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Risiko Likuiditas

No.	Tipe Risiko	Mitigasi
1.	Risiko yang diakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan	✓ Mengidentifikasi situasi yang dapat menimbulkan kesenjangan aktiva dan kewajiban lancar agar dapat dicari solusi lebih awal untuk mengatasi dan mengurangi risiko terjadinya kerugian. ✓ Membuat mekanisme yang jelas secara detail, mulai dari teknis dan non-teknis. Dengan demikian, setiap kali memutuskan dan melakukan sesuatu, Perusahaan memiliki tolok ukur yang jelas. Mekanisme yang jelas juga akan membantu untuk mengelola, mengukur, memantau, hingga mencegah terjadinya risiko likuiditas.. ✓ Meningkatkan cadangan Kas, dimana Kas memiliki sifat likuid yang membantu menjaga kesehatan keuangan perusahaan, sebab proses pencairannya berlangsung lebih cepat sehingga mampu memenuhi kewajiban perusahaan untuk melunasi bebannya secara tepat waktu tanpa mengalami kendala. Meningkatkan cadangan Kas juga membantu perusahaan untuk menjaga aset lancarnya, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah. ✓ Memiliki system informasi manajemen yang bermanfaat dalam memonitor perkembangan aktiva dan kewajiban lancar.

BAB VII
PENUTUP

Kami patut bersyukur karena dapat melewati tahun 2023 dengan baik, meskipun dengan pencapaian kinerja yang kurang baik atau belum seperti yang diharapkan. Terdapat beberapa indikator seperti NPL, BOPO, LDR relatif tinggi dan mengalami kerugian. Kedepannya manajemen akan memperbaiki kinerja Bank dengan lebih baik dan hal ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kinerja agar kedepannya lebih baik.

Segenap jajaran Manajemen dan Pegawai kini telah mencanangkan tekad bulat untuk menjadikan PT BPR Bhakti Riyadi sebagai salah satu BPR unggul di Kabupaten Klaten. Manajemen mengakui bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari segenap insan di PT BPR Bhakti Riyadi. Untuk itu, Manajemen mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pegawai yang penuh talenta atas dedikasi dan kerja keras dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mendukung upaya untuk mewujudkan visi, misi dan target PT BPR Bhakti Riyadi tanpa mengenal lelah.

Pencapaian PT BPR Bhakti Riyadi sampai saat ini juga tidak mungkin diraih tanpa dukungan dari semua pihak. Manajemen mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah, Pemegang Saham, Regulator Perbankan dan Mitra Usaha serta seluruh stakeholders yang telah berperan serta dalam memajukan PT BPR Bhakti Riyadi. Penting juga untuk menghargai dukungan dari komunitas yang lebih luas yang telah kami layani. Sebagai rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh nasabah PT BPR Bhakti Riyadi atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami selami ini.

Klaten, 25 April 2024

**PT.Bank Perkreditan Rakyat
Bhakti Riyadi**


Anggoro Mahendra Setyawan **Sumanto**
Direktur Utama Direktur/Dir.YMF Kepatuhan

Dewan Komisaris,


Syamsul Ma'arif **Setya Jati Kusuma**
Komisaris Utama Komisaris



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BHAKTI RIYADI**

PT. BPR BHAKTI RIYADI

Laporan Keuangan

**Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada
31 Desember 2023**

PT. BPR BHAKTI RIYADI
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
▪ Surat Pernyataan Direksi	
▪ Laporan Auditor Independen	
▪ Laporan Neraca	1
▪ Laporan Laba Rugi	2
▪ Laporan Perubahan Ekuitas	3
▪ Laporan Arus Kas	4
▪ Catatan Atas Laporan Keuangan	
▪ Pernyataan Kepatuhan dan Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	5
▪ Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan.	13
▪ Pengungkapan Lainnya	24
▪ Lampiran	

.....

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

.....



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
PT. BPR BHAKTI RIYADI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Anggoro Mahendra Setyawan**
Alamat Kantor : Jl. Kartini, By Pass Krapyak, Tegalyoso, Klaten, Jawa Tengah.
Jabatan : Direktur Utama

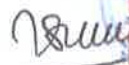
Nama : **Sumanto**
Alamat Kantor : Jl. Kartini, By Pass Krapyak, Tegalyoso, Klaten, Jawa Tengah.
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR BHAKTI RIYADI periode 31 Desember 2023.
2. Laporan keuangan PT. BPR BHAKTI RIYADI periode 31 Desember 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR BHAKTI RIYADI periode 31 Desember 2023 telah dimuat secara lengkap dan benar,
b. Laporan keuangan PT. BPR BHAKTI RIYADI periode 31 Desember 2023 tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pada PT. BPR BHAKTI RIYADI periode 31 Desember 2023.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Klaten, 28 Maret 2024




(Sumanto)
Direktur

(Anggoro Mahendra Setyawan)
Direktur Utama

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00064/2.1358/AU.2/07/1764-2/1/III/2024

Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPR Bhakti Riyadi

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR Bhakti Riyadi, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PT. BPR Bhakti Riyadi terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, laporan laba rugi dan perubahan ekuitas serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Partner



M. Yudhika Elrifi, M.Sc. Ak. CA, CPA, CFrA
No. Izin AP.1764

Yogyakarta, 28 Maret 2024: DK



LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR BHAKTI RIYADI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

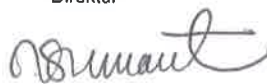
Uraian	Catatan	31 Des 2023	31 Des 2022
ASET			
Kas	3.1	94.929.100	35.524.000
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	3.2	187.141.655	188.185.855
Penempatan Pada Bank Lain	3.3	4.799.339.155	3.632.569.479
Kredit yang Diberikan	3.4	16.447.302.030	12.502.277.217
Provisi & Administrasi	3.4	(188.712.931)	(151.713.551)
Pendapatan Bunga Ditangguhkan	3.4	(1.585.921)	(7.594.619)
PPAP Kredit Yang Diberikan	3.4	(106.757.973)	(80.917.257)
Aset Tetap dan Inventaris	3.5	1.674.836.274	1.618.037.744
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	3.5	(999.289.891)	(899.727.368)
Aset Tidak Berwujud	3.6	32.007.745	32.007.745
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.6	(32.007.744)	(32.007.744)
Aset Lain-Lain	3.7	238.554.725	245.611.570
Jumlah Aset		22.145.756.224	17.082.253.071
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	3.8	93.654.322	150.455.889
Utang Bunga	3.9	36.308.165	19.245.319
Utang Pajak	3.10	-	3.823.534
Simpanan	3.11		
Tabungan		3.456.487.246	3.327.645.940
Deposito Berjangka		8.863.200.000	7.673.200.000
Simpanan dari Bank Lain	3.12	5.233.155.500	1.422.120.313
Kewajiban Imbalan Kerja	3.13	124.818.750	80.568.750
Kewajiban Lain-Lain	3.14	63.809.153	101.721.828
Jumlah Kewajiban		17.871.433.136	12.778.781.573
EKUITAS	3.15		
Modal Dasar		8.000.000.000	8.000.000.000
Modal Belum Disetor		(4.985.000.000)	(4.985.000.000)
Modal Disetor		3.015.000.000	3.015.000.000
Saldo Laba			
Cadangan Umum		400.000.000	400.000.000
Labanya Yang Belum Ditentukan Tujuannya:			
Labanya (Rugi) Tahun Lalu		888.471.498	663.824.448
Labanya (Rugi) Tahun Berjalan		(29.148.410)	224.647.050
Jumlah Saldo Laba		1.259.323.088	1.288.471.498
Jumlah Ekuitas		4.274.323.088	4.303.471.498
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		22.145.756.224	17.082.253.071

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Klaten, 28 Maret 2024

Direktur

Direktur Utama



(Sumanto)



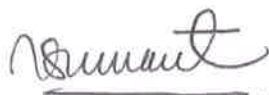

(Anggoro Mahendra Setyawan)

PT. BPR BHAKTI RIYADI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2023	31 Des 2022
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga	3.16	2.568.292.397	2.866.969.166
Pendapatan Provisi dan Administrasi	3.16	138.428.870	210.977.755
Beban Bunga	3.18	(735.204.151)	(719.398.789)
Pendapatan Operasional Lainnya	3.17	397.502.512	289.758.915
Jumlah Pendapatan Operasional		2.369.019.628	2.648.307.047
Beban Operasional			
Beban Penyisihan Kerugian	3.19	35.840.716	7.750.000
Beban Pemasaran	3.20	26.438.440	20.244.201
Beban Administrasi dan Umum	3.21	2.335.964.691	2.382.571.406
Beban Operasional Lainnya	3.22	16.518.900	10.554.600
Jumlah Beban Operasional		2.414.762.747	2.421.120.207
Laba (Rugi) Usaha		(45.743.119)	227.186.840
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional			
Pendapatan non-operasional	3.23	32.527.419	37.649.654
Beban non-operasional	3.24	(15.932.710)	(12.035.000)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		16.594.709	25.614.654
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(29.148.410)	252.801.494
Taksiran Pajak Penghasilan	3.25		(28.154.444)
Laba (Rugi) Neto		(29.148.410)	224.647.050

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Direktur



(Sumanto)

Klaten, 28 Maret 2024

Direktur Utama





(Anggoro Mahendra Setyawan)

PT. BPR BHAKTI RIYADI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Modal		Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
	Modal Saham	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Blm Ditentukan Tujuannya	
Saldo 31 Desember 2021	3.015.000.000	-	400.000.000	663.824.448	4.078.824.448
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	224.647.050	224.647.050
Saldo 31 Desember 2022	3.015.000.000	-	400.000.000	888.471.498	4.303.471.498
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	(29.148.410)	(29.148.410)
Saldo 31 Desember 2023	3.015.000.000	-	400.000.000	859.323.088	4.274.323.088

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT. BPR BHAKTI RIYADI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	31 Des 2023	31 Des 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Neto	(29.148.410)	224.647.050
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi:		
Penyusutan aset tetap	99.562.523	62.542.196
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	-	-
Kredit	25.840.716	7.750.000
Amortisasi:		
Aset tidak berwujud	-	-
Provisi dan Administrasi	36.999.380	(34.865.055)
PERUBAHAN ASET DAN KEWAJIBAN OPERASI		
Penempatan Pada Bank Lain	(1.166.769.676)	(4.326.078)
Pendapatan Bunga Yang akan Diterima	1.044.200	(15.899.734)
Kredit Yang Diberikan	(3.945.024.813)	1.585.615.971
Pendapatan Bunga Ditangguhkan	(6.008.698)	6.176.190
Aset Lain-Lain	7.056.845	(72.052.170)
Kewajiban Segera	(56.801.567)	93.733.024
Utang Bunga	17.062.846	(3.918.051)
Utang Pajak	(3.823.534)	(2.968.345)
Simpanan		
Tabungan	128.841.306	(756.264.080)
Deposito Berjangka	1.190.000.000	(519.000.000)
Simpanan dari Bank Lain	3.811.035.187	(676.380.356)
Kewajiban Imbalan Kerja	44.250.000	80.568.750
Kewajiban Lain-Lain	(37.912.675)	1.164.600
Arus kas neto dari aktivitas operasi	116.203.630	(23.476.088)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan Aset Tetap dan Inventaris	(56.798.530)	13.752.788
Pembelian/penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-
Arus kas neto untuk aktivitas investasi	(56.798.530)	13.752.788
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan-pembulatan		
Arus kas neto untuk aktivitas pendanaan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	59.405.100	(9.723.300)
Kas pada Awal Periode	35.524.000	45.247.300
Kas pada Akhir Periode	94.929.100	35.524.000
	59.405.100	(9.723.300)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen PT. BPR BHAKTI RIYADI menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2023 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding 2022 Audited disajikan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan ditetapkan oleh BPR, yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan hasil usahanya, dijelaskan dibawah ini.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT. BPR BHAKTI RIYADI disusun sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan BPR serta prinsip dan praktek Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar. Sedangkan dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

BPR mengungkapkan transaksi dengan pihak hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

1. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara pihak tersebut:
 - mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries);
 - memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas, atau;
 - memiliki pengendalian bersama atas entitas.
2. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi, joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture, dan personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya.
3. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam nomor pertama dan keempat, pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh atau memiliki hak suara secara signifikan secara langsung atau tidak langsung setiap orang yang diuraikan dalam nomor dua.
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam poin ketiga atau keempat, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.
6. Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

c. Kas dan Penempatan pada bank lain

Kas terdiri dari mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas meliputi kas besar, kas kecil, dan kas dalam perjalanan. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagai mana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.

Penempatan Pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan. Apabila suatu saat dana tersebut tidak dapat dicairkan, maka dana yang tercairkan terlebih dahulu disisihkan ke penyisihan penghapusan aktiva produktif. Nilai pencatatannya sebesar dana yang tidak tercairkan.

d. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima terdiri dari pendapatan bunga dari kualitas kredit dengan kualitas lancar yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan bunga dari penempatan pada bank lain.

e. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo pinjaman setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit. BPR membentuk penyisihan kerugian kredit berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing saldo pinjaman pada akhir tahun dan disajikan sebagai pos pengurang. Kredit diklasifikasikan sebagai non-performing pada saat pokok pinjaman telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga pinjaman tersebut diragukan. Pendapatan bunga atas pinjaman yang telah diklasifikasikan sebagai diragukan ini diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan kerugian kredit dari nilai pokok, jika penerimaan kembali melebihi nilai pokoknya maka kelebihannya diakui sebagai pendapatan bunga.

Pelaksanaan perkreditan BPR disesuaikan dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR pada Lampiran POJK No. 33/ POJK.33/ 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.

Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit. Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu kredit setelah direstrukturisasi.

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan apabila tidak terdapat penyaluran kredit.

Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.

Pedoman pembentukan penyisihan aset produktif mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku mulai 1 Desember 2019 dimana dinyatakan tentang besarnya penyisihan yang harus dibentuk sebagai berikut:

PPAP Penempatan pada bank lain

Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas tabungan atau deposito tersebut disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari tabungan atau deposito tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).

PPAP Kredit

Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.

Penghapusbukuan Kredit (Hapus Buku) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur.

Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dihitung dari jumlah prosentase tertentu dengan mempertimbangkan nilai agunan dengan perhitungan sebagai berikut :

PPAP umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.

PPAP khusus ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:

1. Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap yaitu:
 - 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.
2. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
3. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau
4. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan agunan.

Peraturan yang mengatur penyisihan kerugian yaitu sesuai ketentuan POJK No. 33/ POJK.33/ 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.

g. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih merupakan aset yang diperoleh PT. BPR BHAKTI RIYADI baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. BPR BHAKTI RIYADI.

Agunan yang diambil alih disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah. Pelaksanaanya disesuaikan dengan POJK No. 33/ POJK.33/ 2018

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

h. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dan inventaris merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administrative dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Seluruh aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PP 55 tahun 2022 Bab V Pasal 21.

Penyusutan harta berwujud sesuai PP 55 tahun 2022 Bab V Pasal 21 ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	15%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II Bangunan Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap tersedia untuk digunakan dan penyusutannya dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

Pengeluaran setelah biaya perolehan suatu aset tetap dan inventaris yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap dan inventaris tersebut serta biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari dari aset tetap dan inventaris sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

Revaluasi aset tetap dan inventaris pada umumnya tidak diperkenankan, revaluasi aset tetap dan inventaris dapat dilakukan apabila berdasarkan ketentuan pemerintah.

Selisih antara nilai aset tetap dan inventaris setelah revaluasi dengan nilai tercatat diakui sebagai Surplus Revaluasi Aset Tetap dalam ekuitas. Surplus Revaluasi Aset Tetap tersebut di reklasifikasi ke Saldo Laba pada saat aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

i. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

j. Aset Lain - Lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

- 1) Perjanjian Kontrak-Sewa Bangunan-Ruko-Kantor yang telah dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi dengan Tuan Sutiman pada tanggal 17 Januari 2019 yaitu sebuah tanah seluas 33 meter persegi beserta bangunannya. Letak bangunan di Jalan Juwiring Rt 01/Rw 03, Juwiring, Juwiring, Klaten.
Perjanjian perpanjangan Kontrak-Sewa ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 14 Januari 2024, dengan demikian berakhir 14 Januari 2024, dengan catatan diperpanjang setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
Harga Kontrak-Sewa selama perjanjian 5 (lima) tahun sebesar Rp 50.000.000,- (seratus juta rupiah). Pajak-pajak menjadi tanggung jawab Tuan Sutiman.
- 2) Perjanjian Kontrak-Sewa Bangunan-Tanah Pekarangan yang telah dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi dengan Nyonya Endang Ninik Setyaningsih pada tanggal 31 Januari 2020 yaitu berupa tanah pekarangan seluas 705 meter persegi.
Letak bangunan dikenal di Jalan Kartini, ByPass, Klaten, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Jawa Tengah.
Perpanjangan Perjanjian Kontrak-Sewa ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan demikian akan berakhir 31 Desember 2024, dengan catatan dapat diperpanjang setelah ada perjanjian dari kedua belah pihak.
Harga Kontrak-Sewa selama perjanjian 5 (lima) tahun sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Pajak-pajak menjadi tanggung jawab Nyonya Endang Ninik Setyaningsih.
- 3) Perjanjian Sewa Kendaraan yang telah dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi dengan Tuan Anggoro Mahendra Setyawan pada tanggal 16 Maret 2021 yaitu sebuah Sepeda Motor Honda tahun pembuatan 2021.
Perjanjian Sewa Kendaraan ini diadakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 dengan catatan dapat diperpanjang setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
Harga Kontrak-Sewa selama perjanjian 2 (dua) tahun sebesar Rp 19,704.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah). Pajak-pajak menjadi tanggung jawab Tuan Anggoro Mahendra.
- 4) Perjanjian Sewa Kendaraan yang telah dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi dengan Tuan Sumanto pada tanggal 16 Maret 2021 yaitu sebuah Sepeda Motor Honda tahun pembuatan 2021.
Perjanjian Sewa Kendaraan ini diadakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 dengan catatan dapat diperpanjang setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
Harga Kontrak-Sewa selama perjanjian 2 (dua) tahun sebesar Rp 19,704.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah). Pajak-pajak menjadi tanggung jawab Tuan Sumanto .
- 5) Perjanjian Sewa Kendaraan yang telah dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi dengan Tuan Endro Wibowo pada tanggal 16 Maret 2021 yaitu sebuah Sepeda Motor Honda tahun pembuatan 2021.
Perjanjian Sewa Kendaraan ini diadakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 dengan catatan dapat diperpanjang setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
Harga Kontrak-Sewa selama perjanjian 2 (dua) tahun sebesar Rp 19.704.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah). Pajak-pajak menjadi tanggung jawab Tuan Endro Wibowo .
- 6) Perjanjian Kontrak-Sewa Bangunan-Ruko-Kantor yang telah dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi dengan Tuan Joko Siwanto pada tanggal 26 Desember 2019 berupa Kios/Pertokoan di desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Perjanjian Kontrak-sewa ini diadakan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan terhitung 30 Januari 2020 sampai 30 Juni 2026, dengan catatan dapat diperpanjang pada saat berakhirnya jangka waktu sewa atas persetujuan pihak ketiga. Harga Kontrak-sewa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah). Pajak-pajak ditanggung oleh Tuan Joko Siwanto.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

- 7) Perjanjian Kontrak-Sewa Bangunan-Ruko-Kantor yang telah dilakukan PT BPR Bhakti Riyadi dengan Tuan Supardi pada tanggal 13 Desember 2019 berupa Kios/Pertokoan di Jalan Gunungkidul-Klaten, Brangkal Nomor 9, Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Perjanjian Kontrak-sewa ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 01 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2024. Harga Kontrak-sewa selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

k. Kewajiban Segera

Kewajiban segera dibayar merupakan kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Kewajiban segera dibayar meliputi saldo rekening tabungan yang sudah ditutup dan deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh pemilik, kiriman uang masuk/keluar, kredit yang diberikan yang bersaldo kredit ketika nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah terutang secara kontraktual, selisih hasil penjualan agunan yang dikuasai BPR yang merupakan hak debitur, dividen yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan, potongan pajak penghasilan karyawan dan pajak atas bunga final (PPh pasal 21, pasal 23, Pasal 4 ayat 2) dan denda/sanksi kewajiban membayar kepada instansi terkait.

l. Utang Bunga

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

m. Utang Pajak

Utang pajak merupakan selisih kurang atas Kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka. Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

n. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

o. Kewajiban Imbalan Kerja

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja pada pos tersendiri.

Bank mempunyai kewajiban untuk memberi Imbalan Pasca Kerja yang didasarkan atas masa kerja (Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000). Undang-undang No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan menggantikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja diatas. Imbalan Pasca Kerja adalah jumlah dari manfaat masa datang yang akan diterima karyawan sebagai imbalan dari jasa mereka saat ini dan masa lalu. Kedepannya BPR menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam revisi Pemerintah.

p. Kewajiban Lain - Lain

Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Kewajiban lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos sendiri.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

q. Modal

Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal bank berupa kas maupun aset non-kas. Modal disetor dicatat berdasarkan:

- Jumlah uang yang diterima;
- Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata;
- Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal;
- Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham. Yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
- Nilai wajar aset non-kas yang diterima.

r. Saldo Laba

Saldo laba merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu dan reklasifikasi surplus, revaluasi aset tetap.

Saldo laba dikelompokkan menjadi:

- Cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan;
- Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal;
- Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya terdiri dari laba periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya dan laba rugi periode berjalan.

Cadangan Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Bank wajib setiap tahun menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan mencapai 20% dari modal yang ditempatkan. Penentuan jumlah penyisihan sebagaimana yang dimaksud akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

s. Pendapatan Operasional

Bank mengakui pendapatan dan beban bunga dengan menggunakan metode *accrual*. Bank tidak mengakui pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aset produktif lainnya yang telah diklasifikasikan sebagai *non-performing*. Pendapatan bunga atas aset *non-reforming* yang belum diterima dicatat sebagai tagihan kontijensi. Yang dimaksud dengan aset produktif *non-reforming* adalah bilamana terdapat tunggakan pokok, tunggakan bunga dan cerukan sebagaimana tercatat dalam ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

Provisi yang sehubungan dengan kredit yang diberikan diakui sebagai pendapatan provisi yang di amortisasi selama jangka waktu kredit.

Provisi sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima dari bank umum di amortisasi selama jangka waktu pinjaman kredit yang diberikan.

Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

t. Beban Operasional

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR.

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

u. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non-operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

v. Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

w. Taksiran Pajak penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Kas

Saldo Kas 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Kas	94.929.100	35.524.000
Saldo Kas	<u>94.929.100</u>	<u>35.524.000</u>

3.2 Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima (PBAD)

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
PBAD-Kredit Yang Diberikan	184.536.615	186.943.796
PBAD-Penempatan Pada Bank Lain	2.605.040	1.242.059
Saldo Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	<u>187.141.655</u>	<u>188.185.855</u>

3.3 Penempatan Pada Bank Lain

Saldo Penempatan Pada Bank Lain 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Giro		
Giro BCA	102.958.316	93.076.316
Giro BRI	93.229.801	46.559.841
Giro Mandiri	43.888.363	4.975.000
Giro BNI	43.775.267	27.280.297
Giro BTN	11.347.270	10.697.500
Saldo Giro Penempatan Pada Bank Lain	<u>295.199.017</u>	<u>182.588.954</u>
Tabungan		
Bank BPD Pedan	20.640.108	14.022.397
Bank BPD Plaza Klaten	81.801.087	32.415.901
Bank Jateng Cabang Klaten	27.331.097	26.113.209
BNI	1.601.880.333	519.758.566
Bank Mandiri	1.386.954.374	1.125.902.875
Bank Danamon	105.533.140	101.767.578
Saldo Tabungan Penempatan Pada Bank Lain	<u>3.224.140.138</u>	<u>1.819.980.525</u>

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Deposito		
Bank Danamon Klaten	450.000.000	700.000.000
Bank Jateng Cabang Klaten	30.000.000	30.000.000
BPR Sari Bumi	800.000.000	400.000.000
BPD Pedan	-	500.000.000
Saldo Deposito Penempatan Pada Bank Lain	1.280.000.000	1.630.000.000
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	4.799.339.155	3.632.569.479
3.4 Kredit Yang Diberikan		
Saldo Kredit Yang Diberikan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :	31 Desember 2023 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>
a. Berdasarkan Jenis Penggunaan Kredit		
- Modal Kerja	9.563.530.412	6.538.991.779
- Investasi	3.623.719.828	2.836.897.117
- Konsumsi Lainnya	3.260.051.790	3.126.388.321
Saldo Berdasarkan Jenis Penggunaan Kredit	16.447.302.030	12.502.277.217
b. Berdasarkan Kolektibilitas Kredit		
- Lancar	11.458.108.862	8.807.768.521
- Dalam Perhatian Khusus	2.790.810.300	2.626.856.501
- Kurang Lancar	-	49.927.200
- Diragukan	792.736.800	263.576.700
- Macet	1.405.646.068	754.148.295
Saldo Berdasarkan Kolektibilitas Kredit	16.447.302.030	12.502.277.217
c. Berdasarkan Keterkaitan		
- Pihak terkait	63.449.900	74.712.400
- Pihak Tidak Terkait	16.383.852.130	12.427.564.817
Saldo Berdasarkan Keterkaitan	16.447.302.030	12.502.277.217
d. Biaya Provisi Administrasi dan Biaya Transaksi		
Saldo Biaya Provisi Administrasi Dan Biaya Transaksi	(188.712.931)	(151.713.551)
e. Pendapatan Bunga Yang Ditangguhkan	(1.585.921)	(7.594.619)
f. PPAP Kredit yang diberikan		
Saldo Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :	31 Desember 2023 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>
Saldo awal	(80.917.257)	(73.167.257)
Pembentukan penyisihan (-)	(35.840.716)	(7.750.000)
Pembalikan (+) selama tahun berjalan	10.000.000	
Saldo PPAP Kredit Yang Diberikan	(106.757.973)	(80.917.257)
Kredit yang Diberikan	16.150.245.205	12.262.051.790

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan kredit yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.5 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Keterangan	31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	31-Des-23
Harga Perolehan				
Tanah dan Bangunan	877.620.000			877.620.000
Inventaris	740.417.744	56.798.530		797.216.274
Jumlah	1.618.037.744	56.798.530	-	1.674.836.274
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	(303.135.800)	(29.074.800)		(332.210.600)
Inventaris	(596.591.568)	(70.487.723)	-	(667.079.291)
Nilai Buku :	718.310.376	(99.562.523)	-	675.546.383

Keterangan	31-Des-21	Penambahan	Pengurangan	31-Des-22
Harga Perolehan				
Tanah dan Bangunan	877.620.000			877.620.000
Inventaris	754.170.532	17.197.212	30.950	740.417.744
Jumlah	1.631.790.532	17.197.212	30.950	1.618.037.744
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	(274.061.000)	(29.074.800)		(303.135.800)
Inventaris	(563.124.172)	(64.417.396)	(30.950)	(596.591.568)
Nilai Buku :	794.605.360	(93.492.196)	(30.950)	718.310.376

3.6 Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Saldo Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
Aset Tidak Berwujud	32.007.745	32.007.745
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(32.007.744)	(32.007.744)
Nilai sisa Aset Tidak Berwujud	1	1

3.7 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Sewa kantor kas Cawas	3.000.000	15.000.000
Sewa kantor kas Juwiring	-	9.996.800
Sewa kantor Jatinom	27.296.000	38.222.000
Sewa kendaraan	-	7.389.000
Sewa area parkir	10.998.400	21.998.800
Biaya SLA dibayar dimuka	10.832.800	27.083.200
DPLK Manulife	-	80.568.750
Lainnya	186.427.525	45.353.020
Saldo Aset Lain-Lain	238.554.725	245.611.570

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.8 Kewajiban Segera

Saldo Kewajiban Segera 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Kewajiban Kepada Pemerintah		
Titipan Pajak Pasal 21	6.363.500	7.928.557
Titipan Pajak Pasal 4 Ayat 2	10.034.735	8.234.099
Titipan Pajak Pasal 23	3.650	10.200
Titipan Nasabah		
Titipan Uang Nasabah	27.067.500	81.147.300
Titipan BPJS Tenaga Kerja	199.584	-
Titipan BPJS Kesehatan	2.827.500	2.963.750
Titipan DPLK	1.200.000	1.200.000
Titipan Asuransi Kredit	5.417.853	5.376.983
Titipan Uang Kesehatan	1.450.000	1.625.000
Titipan Uang Notaris	38.930.000	41.930.000
Titipan Uang Materai	160.000	40.000
Saldo Kewajiban Segera	<u>93.654.322</u>	<u>150.455.889</u>

3.9 Utang Bunga

Saldo Utang Bunga 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Deposito blum jatuh tempo	26.592.775	18.933.492
Simpanan Dari Bank Lain belum jatuh tempo	9.715.390	311.827
Saldo Utang Bunga	<u>36.308.165</u>	<u>19.245.319</u>

3.10 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
PPh Pasal 29	-	3.823.534
Saldo Utang Pajak	<u>-</u>	<u>3.823.534</u>

3.11 Simpanan

Saldo Simpanan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Tabungan Pihak Ketiga Bukan Bank berdasarkan jenis tabungan

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Tabungan Artha Riyadi	1.897.320.161	2.227.886.979
Tabungan Dana Bhakti	808.165.080	380.512.094
Tabungan Khusus	1.774.998	1.828.959
TabunganKu	461.755.646	353.818.274
Tabungan Sempel	265.000	265.000
Tabungan DHR	287.206.361	363.334.634
Saldo	<u>3.456.487.246</u>	<u>3.327.645.940</u>

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabungan Pihak Ketiga Bukan Bank berdasarkan Keterkaitan

Tabungan Pihak Terkait	469.125.113	368.791.358
Tabungan Pihak Tidak Terkait	2.987.362.133	2.958.854.582
Saldo	3.456.487.246	3.327.645.940

Deposito Berjangka Pihak Ketiga Bukan Bank berdasarkan Jenis Deposito

Deposito		
Deposito Umum 1 Bulan	481.500.000	182.500.000
Deposito Umum 3 Bulan	1.199.000.000	1.339.500.000
Deposito Umum 6 Bulan	5.351.500.000	4.730.000.000
Deposito Umum 12 Bulan	1.778.700.000	1.421.200.000
Deposito Umum 24 Bulan	52.500.000	-
Saldo	8.863.200.000	7.673.200.000

Deposito Pihak Ketiga Buka Bank berdasarkan Keterkaitan

Deposito Pihak Terkait	2.657.000.000	1.735.500.000
Deposito Pihak Tidak Terkait	6.206.200.000	5.937.700.000
Saldo	8.863.200.000	7.673.200.000

Rincian Deposito Terkait sebagai berikut:

Saldo Simpanan	12.319.687.246	11.000.845.940
-----------------------	-----------------------	-----------------------

3.12 Simpanan Dari Bank Lain

Saldo Simpanan Dari Bank Lain 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	31 Desember 2023 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>
Tabungan Simpanan Dari Bank Lain		
PT BPR BKK KARANGMALANG PERSERODA	199.847.138	143.151.179
PT BPR SHINTA BHAKTI WEDI	306.485.877	257.910.795
PT BPR SHINTA PUTRA PENGASIH	26.822.485	21.058.339
Deposito Dari Bank Lain		
KBPR BANK PASAR PATMA	500.000.000	-
PT BPR BKK KARANGMALANG PERSERODA	300.000.000	300.000.000
PT BPR BKK KARANGMALANG PERSERODA	500.000.000	500.000.000
PT BPD JATENG CQ DIVISI BKTB	300.000.000	-
PT BPR ANTAR RUMEKSA ARTHA	250.000.000	-
PT BPR ANTAR RUMEKSA ARTHA	250.000.000	200.000.000
PT BPR GUNUNG MAS	400.000.000	-
PT BPR GUNUNG MAS	700.000.000	-
PT BPR HARDIMAS MANDIRI	500.000.000	-
PT BPR GAJAH MUNGKUR	500.000.000	-
PT BPR SHINTA BHAKTI WEDI	200.000.000	-
PT BPR SHINTA BHAKTI WEDI	300.000.000	-
Saldo Simpanan Dari Bank Lain	5.233.155.500	1.422.120.313

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.13 Kewajiban Imbalan Kerja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Utang Pajak 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Kewajiban Imbalan Kerja	124.818.750	80.568.750
Saldo Kewajiban Imbalan Kerja	124.818.750	80.568.750
3.14 Kewajiban Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Kewajiban Lain-lain 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Biaya Iuran Perbarindo	2.250.000	-
Penyisihan Insentif Akhir Tahun	-	40.000.000
Penyisihan Biaya Pendidikan	61.559.153	61.721.828
Saldo Kewajiban Lain-Lain	63.809.153	101.721.828
3.15 Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Ekuitas 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Modal Dasar	8.000.000.000	8.000.000.000
Modal yang belum disetor	(4.985.000.000)	(4.985.000.000)
Modal Disetor	3.015.000.000	3.015.000.000
Saldo Laba		
Cadangan Umum	400.000.000	400.000.000
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	888.471.498	663.824.448
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(29.148.410)	224.647.050
Saldo Ekuitas	4.274.323.088	4.303.471.498
3.16 Pendapatan Operasional	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah Pendapatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
PEND-BUNGA KONTRAKTUAL		
Pendapatan Bunga Kontraktual-Penempatan pada Bank Lain		
PBL-Giro	1.773.774	1.992.806
PBL-Tabungan	23.855.339	14.521.459
PBL-Deposito	23.100.019	53.922.197
Jumlah	48.729.132	70.436.462
Pendapatan Bunga Kredit-Kpd phk ke 3 Bukan Bank		
Kredit yg diberikan	2.519.563.265	2.796.532.704
Jumlah	2.519.563.265	2.796.532.704
Pendapatan Provisi Kredit		
Jumlah	138.428.870	210.977.755
Jumlah Pend-Bunga Kontraktual	2.706.721.267	3.077.946.921

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.17 Pendapatan Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Penerimaan kredit yang dihapusbuku	-	-
Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	10.000.000	-
Lainnya	-	-
Adm. surat pengantar pajak	-	5.000
Denda kredit	206.773.221	150.720.111
Pendapatan pinanti deposito	1.469.166	210.000
Administrasi kredit	121.243.450	80.527.429
Lainya	5.490.800	8.906.600
Administrasi tabungan	29.403.675	33.168.796
Pendapatan pinalti tabungan	-	615.979
Pendapatan survey	23.122.200	15.605.000
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	<u>397.502.512</u>	<u>274.153.915</u>

3.18 Beban Bunga

Jumlah Beban Bunga sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Tabungan	68.800.593	100.152.696
Deposito	454.491.822	471.538.440
Simpanan Dari Bank Lain		
Tabungan dari bank lain	11.733.937	7.814.044
Deposito dari bank lain	177.082.799	112.802.609
Lainnya		
Biaya LPS	23.095.000	27.091.000
Koreksi atas Bunga	-	-
Jumlah Beban Bunga	<u>735.204.151</u>	<u>719.398.789</u>

3.19 Beban Penyisihan Kerugian

Jumlah Beban Penyisihan Kerugian sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Beban PPAP Simpanan pd Bank Lain	-	-
Beban PPAP kredit umum	35.840.716	-
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	<u>35.840.716</u>	<u>-</u>

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

3.20 Beban Pemasaran	<u>31 Desember 2023</u> (Audited)	<u>31 Desember 2022</u> (Audited)
Jumlah Beban Pemasaran sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
Beban Pemasaran	26.438.440	20.244.201
Jumlah Beban Pemasaran	26.438.440	20.244.201

3.21 Beban Administasi dan Umum

Jumlah Beban Administasi Dan Umum sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u> (Audited)	<u>31 Desember 2022</u> (Audited)
Beban Tenaga Kerja		
Gaji, upah dan tunjangan	685.405.060	723.775.872
Tunjangan	-	-
Tunjangan Jabatan	204.618.250	203.395.280
Tunjangan Komunikasi	62.942.406	57.700.586
Tunjangan Kesehatan	28.235.520	26.652.080
Tunjangan Transport	128.211.250	121.133.596
Tunjangan PPh Penghasilan	93.337.617	85.435.500
Honorarium	157.582.800	156.067.632
Lain-lain	-	-
Beban Uang Makan	116.397.496	126.245.550
Beban Lembur	62.873.525	60.742.044
Beban THR	91.103.946	95.898.113
Beban Insentif Akhir Tahun	-	40.000.000
Bingkisan Lebaran	3.085.475	3.137.000
Lainnya	75.847.988	59.905.237
Imbalan Kerja	42.000.000	42.000.000
Beban Manulife	60.000.000	54.000.000
Beban BPJS	75.570.630	71.072.369
Jumlah	1.887.211.963	1.927.160.859
Beban Pendidikan	48.600.000	48.000.000
Beban Sewa		
Sewa Gedung		
Gedung Kantor Cawas	12.000.000	12.000.000
Gedung Kantor Juwiring	9.996.800	10.000.800
Gedung Kantor Jatinom	10.926.000	10.926.000
Sewa Kendaraan-Motor	7.389.000	29.556.000
Lainnya-Area Parkir	11.000.400	11.000.400
Jumlah	51.312.200	73.483.200

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Penyusutan/ Penghapusan/ Amortisasi

Penyusutan Gedung	29.074.800	29.074.800
Penyusutan Inventaris	70.487.723	64.417.396
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Jumlah	99.562.523	93.492.196

Beban Premi Asuransi

Premi Asuransi	375.000	375.000
Jumlah	375.000	375.000

Beban Pemeliharaan

Kantor	599.000	-
Kendaraan	7.794.500	13.988.000
Peralatan Kantor	26.546.695	26.398.450
Jumlah	34.940.195	40.386.450

Beban Barang dan Jasa

Beban BBM	40.816.655	32.719.871
Beban Listrik	28.892.729	29.380.670
Beban PDAM	2.445.800	2.535.800
Beban Telepon	30.148.842	28.444.759
Beban Notaris	-	3.500.000
Beban Koran	20.760.000	9.012.000
Beban Kirim Surat	2.282.420	1.160.140
Beban Foto Copy	10.993.950	10.899.375
Beban Cetak	6.702.300	8.827.300
Beban ATK	17.381.594	18.064.300
Iuran OJK	10.000.000	10.000.000
Materai	3.224.000	2.662.000
Aqua	3.271.000	3.516.000
Kebersihan Kantor	1.122.162	825.200
Beban Audit	12.500.000	12.500.000
Lainnya	8.669.993	895.100
Beban Perlengkapan Kantor	1.934.634	3.506.199
Beban Proses Legal	8.483.900	15.990.535
Jumlah	209.629.979	194.439.249

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pajak Non PPh

Pajak Tidak Termasuk Pajak Penghasilan	4.332.831	5.234.452
Jumlah	4.332.831	5.234.452

Jumlah Beban Administrasi Dan Umum	2.335.964.691	2.382.571.406
---	----------------------	----------------------

3.22 Beban Operasional Lainnya

Jumlah Beban Operasional Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 Sebagai Berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Administrasi Antar Bank	3.529.700	2.612.900
Beban Transfer	142.400	99.200
Beban RUPS	4.000.000	6.371.500
Sanksi Laporan Bulanan	-	140.000
Jamuan tamu	1.009.200	981.000
Lainnya	7.837.600	350.000
Jumlah Beban Operasional Lainnya	16.518.900	10.554.600

3.23 Pendapatan Non Operasional

Jumlah Pendapatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 Sebagai Berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	-	10.850.000
Fee Asuransi Kredit	5.019.368	6.284.222
Fee Notaris	12.881.000	10.864.000
Penyesuaian Kas	5.358	6.432
Pendapatan DPLK Manulife	1.161.693	-
Pemasangan HT Elektronik dan Roya Elektronik	8.355.000	1.500.000
Lainnya	5.105.000	8.145.000
Jumlah Pendapatan Non Operasional	32.527.419	37.649.654

3.24 Beban Non Operasional

Jumlah Beban Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 Sebagai Berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Iuran Perbarindo	9.000.000	6.000.000
Acara Halalbihalal	500.000	1.350.000
Iuran Sampah	660.000	510.000
Iuran Jimpitan	350.000	315.000
Sumbangan - Sumbangan	1.950.000	948.000
Lainnya	1.672.710	712.000
Duka cita	1.800.000	2.200.000
Jumlah Beban Non Operasional	15.932.710	12.035.000

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.25 Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 Sebagai Berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Laba sebelum Pajak	(29.148.410)	252.801.494
Koreksi fiskal	3.750.000	
Laba kena pajak	(25.398.410)	252.801.494
Pembulatan	(25.399.000)	252.801.000
Omset	3.136.751.198	3.405.355.490
Tarif PPh 29 2021 22%		
Dikarenakan omset < 4,8 M maka tarif PPh 29 dikalikan 50% sehingga menjadi 11%		
Taksiran pajak BPR	-	28.154.444

3.26 Komitmen dan Kontijensi

Jumlah Komitmen Dan Kontijensi sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 Sebagai Berikut :

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
Tagihan kontijensi:		
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	362.929.460	226.455.760
Aktiva Produktif yang Dihapusbukukan:		
Pokok Kredit Produktif Hapus Buku	306.900.500	306.900.500
Bunga Kredit Hapus Buku		
Jumlah Tagihan Kontijensi	<u>669.829.960</u>	<u>533.356.260</u>

PT. BPR BHAKTI RIYADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Pendirian Perusahaan

PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Riyadi didirikan di Klaten Jawa Tengah berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 11 Februari 1995 dibuat oleh Mochamad Imron, Sarjana Hukum, notaris di Klaten yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI tanggal 13 Desember 1995 No:C2-16281 HT.01.01.TH.1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 16 Maret 2004 No:2750. Perusahaan mengubah kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Bambang Nugroho Dwi Suparmanto, SH, MKn, Notaris di Klaten, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19 Agustus 2016, Nomor AHU-AH.01.03-0072678.

Perseroan melakukan perubahan kembali sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Satryo Aji, S.H.,M.Kn Nomor 07 tertanggal 30 Juni 2020 terkait perubahan pemegang saham, dan telah disetujui oleh Hukum Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0271500 tanggal 02 Juli 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Riyadi.

Kemudian Perubahan kembali dalam Akta Notaris Satryo Aji, SH, MKn, Notaris di Klaten No. 08 tanggal 28 Januari 2022 bahwa perpanjangan masa jabatan Komisaris Utama atas nama Bapak Syamsul Ma'arif sampai dengan 16 Februari 2027. Hal ini sesuai dengan surat dari Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0068549 tanggal 31 Januari 2022.

b. Tempat dan Kedudukan

Jalan Kartini Bypass, Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten

c. Perijinan Usaha

Dalam melaksanakan usaha, PT BPR Bhakti Riyadi memiliki perijinan sebagai berikut:

- Surat Izin Menteri Kehakiman No. C2-16281.HT.01.01.Th.95 tanggal 13 Desember 1995
- Izin usaha Menteri Keuangan RI No. Kep-252/MK.17/1996 tanggal 8 Juli 1996
- Surat Izin Gangguan No: 503.I/329/DU/2014 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikeluarkan DJP dengan No: 01.545.834.2-525.000.
- Nomor Induk Berusaha No: 9120103711024 tertanggal 12 Juli 2019

d. Maksud dan Tujuan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Riyadi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengusahakan Bank Perkreditan

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan
- Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/ atau masyarakat pedesaan
- Menempatkan dana
- Menyediakan pembiayaan
- Pelelangan agunan

e. Kegiatan Usaha

PT. Bank Perkreditan Rakyat Riyadi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengusahakan Bank Perkreditan Rakyat dengan lingkup kegiatan usahanya meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan, menempatkan dana, menyediakan dana, pelelangan agunan.

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA (Lanjutan)

f. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus dan Pejabat PT. BPR Bhakti Royadi berdasarkan Struktur Organisasi PT. BPR Bhakti Riyadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Syamsul Ma'arif
Komisaris	: Setya Jati Kusuma
Direktur Utama	: Anggoro Mahendra Setyawan
Direktur	: Sumanto

Susunan Direksi diperpanjang masa jabatannya sampai dengan 14 Juli 2025 sesuai Akta Notaris No. 7 tanggal 30 Juni 2020 oleh Notaris Satryo Aji, SH, MKn, Notaris di Klaten. Kemudian telah diterima dan dicatat di dalam Sistem administrasi badan hukum Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0271495 dan AHU-AH.01.03-0271500 tanggal 2 Juli 2020.

Kemudian dalam Akta Notaris Satryo Aji, SH, MKn, Notaris di Klaten No. 08 tanggal 28 Januari 2022 bahwa perpanjangan masa jabatan Komisaris Utama atas nama Bapak Syamsul Ma'arif sampai dengan 16 Februari 2027. Hal ini sesuai Jumlah pegawai per 31 Desember 2022 (tidak termasuk Komisaris dan Direksi) adalah 17 Orang dengan :

Pemasaran	:2 Orang
Pelayanan	:4 Orang
Jaga Malam	: 2 Orang
Lainnya	: 9 Orang

g. Modal

Modal dasar berjumlah Rp. 8.000.000.000,00 terbagi atas 80.000 saham, yang masing-masing saham bernilai Rp 100.000,00. Modal disetor para pemegang saham Rp 3.015.000,00. Komposisi modal yang ditempatkan oleh para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Satryo, SH, MKn No. 10 tertanggal 31 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

No Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi	%
1 Emy Damayanti R	11.250	1.125.000.000	37,31%
2 Djoko Sutrisno	5.000	500.000.000	16,58%
3 Setya Jati Kusuma	3.256	325.600.000	10,80%
4 Indrawati Hartono	3.211	321.100.000	10,65%
5 Bagus Prihartanto	2.500	250.000.000	8,29%
6 Hermawan Budi Susetya	1.000	100.000.000	3,32%
7 Fairuzaqona Ulfaty	1.000	100.000.000	3,32%
8 Wawan Ari Wibowo	750	75.000.000	2,49%
9 August Dewa Widyasyatma	500	50.000.000	1,66%
10 Grantika	500	50.000.000	1,66%
11 Syamsul Ma'arif	466	46.600.000	1,55%
12 Sri Widayati	417	41.700.000	1,38%
13 Dian Ririt Dewayanti	150	15.000.000	0,50%
14 Haenis Gunarto	100	10.000.000	0,33%
15 Hayuditia Ansita Perdana	50	5.000.000	0,17%
Total	30.150	3.015.000.000	100%

Susunan pemegang saham tersebut juga dipertegas dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 30 Juni 2020 oleh Notaris Satryo Aji, SH, MKn, Notaris di Klaten. Kemudian telah diterima dan dicatat di dalam Sistem administrasi badan hukum Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0271495 dan AHU-AH.01.03-0271500 tanggal 2 Juli 2020.

PT. BPR BHAKTI RIYADI
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Perkembangan Usaha

a. Total asset

Total aset PT. BPR Bhakti Riyadi per 31 Desember 2023, mengalami peningkatan (penurunan) dengan rincian sebagai berikut :

Total asset tahun 2023	22.145.756.224
Total asset tahun 2022	17.082.253.071
Kenaikan	5.063.503.153
Persentase Peningkatan (Penurunan)	29,64%

b. Penghimpunan Dana

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun PT. BPR Bhakti Riyadi per 31 Desember 2023, yaitu deposito dan tabungan dengan rincian sebagai berikut :

	Deposito	Tabungan
Dana yang dihimpun tahun 2023	8.863.200.000	3.456.487.246
Dana yang dihimpun tahun 2022	7.673.200.000	3.327.645.940
Peningkatan (Penurunan)	1.190.000.000	128.841.306
Persentase Peningkatan (penurunan)	15,51%	3,87%

c. Pemberian kredit

Jumlah pinjaman yang diberikan PT. BPR Bhakti Riyadi per 31 Desember 2023, mengalami Peningkatan (Penurunan), dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman yang diberikan tahun 2023	16.447.302.030
Pinjaman yang diberikan tahun 2022	12.502.277.217
Peningkatan (Penurunan)	3.945.024.813
Persentase Peningkatan	31,55%

2. Permodalan

a. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (Rincian Terlampir)

Bank akan selalu memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam bidang permodalan sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bilamana bank tidak memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan yang memengaruhi operasi bank

b. Ratio Kecukupan Modal (Rincian Terlampir)

Bank diwajibkan memenuhi persyaratan ratio kewajiban penyediaan modal (KPM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, yang mempertimbangkan secara kuantitatif seperti aset, kewajiban dan akun of balance sheet tertentu juga pertimbangan secara kualitatif tentang komponen dan resiko tertimbang.

3. Analisa Likuiditas

a. Cash Ratio

Alat Likuid

Kas	94.929.100
Penempatan pada bank lain (giro dan tabungan)-Tabungan ABP	2.986.183.655
Jumlah	3.081.112.755

Hutang Lancar

Kewajiban segera dibayar	93.654.322
Tabungan	3.456.487.246
Deposito berjangka	8.863.200.000
Jumlah	12.413.341.568
Cash Ratio	24,82%

b. Rasio total kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (*Loan to Debt Ratio*)

Loan

Jumlah kredit yang diberikan	16.257.003.178
------------------------------	----------------

Debt

Simpanan pihak ketiga (non bank)	
Tabungan	3.456.487.246
Deposito berjangka	8.863.200.000
Jumlah	12.319.687.246
Loan to debt Ratio	131,96%

4. a. Rasio Rentabilitas

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Beban operasional	3.149.966.898
Pendapatan operasional	3.104.223.779
BOPO	101,47%

b. Batas maksimum pemberian kredit

Modal inti	4.274.323.088
Modal pelengkap	57.253.042
Jumlah Modal	4.331.576.130
Pihak terkait (10%)	433.157.613
Pihak tidak terkait (20) %	866.315.226

c. Return On Aset (ROA)

Rata-Rata Aset Bulanan

Januari	16.393.798.779
Februari	16.326.576.980
Maret	16.191.444.098
April	16.108.831.496
Mei	16.506.889.019
Juni	16.497.246.146
Juli	18.153.728.508
Agustus	21.075.306.407
September	21.354.067.978
Oktober	21.685.209.532
Nopember	22.020.573.249
Desember	22.145.756.224
Rata-Rata Aset	18.704.952.368
Laba Sebelum Pajak	(29.148.410)
Return On Aset (ROA)	-0,16%

5. Aset Produktif (Rincian terlampir)

Tabel di bawah ini menunjukkan perhitungan kualitas aset produktif bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

PT. BPR BHAKTI RIYADI
PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Keterangan		31 Desember 2023			
		Nominal (Bruto)	PPAP Khusus	Nominal (netto)	Bobot Risiko
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas	94.929.100	-	94.929.100	-
2	Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-
3	Kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	7.500.500	-	7.500.500	-
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengambilalihan	-	-	-	-
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR	-	-	-	-
6	Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain	4.799.339.155	-	4.799.339.155	20
7	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	-	-	-	-
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit	-	-	-	-
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama	13.875.488.062	1.328.761	13.874.159.311	30
10	Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	-	-	-	50
11	Kredit kepada pegawai/pensiunan	-	-	-	50
12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama	714.977.100	57.813	714.919.287	50
13	Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil*	-	-	-	70
14	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	357.292.600	52.515	357.240.085	70
15	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	86.397.700	-	86.397.700	100
16	Tagihan kredit yang jatuh tempo atau dengan kualitas macet:	-	-	-	-
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	730.873.968	44.045.868	686.828.100	100
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	674.772.100	-	674.772.100	100
17	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud (nilai buku)	675.546.384	-	675.546.384	100
18	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengambilalihan	-	-	-	100
19	Aktiva lainnya setelah tersebut diatas	425.696.380	-	425.696.380	100
JUMLAH ATMR		22.442.813.049	45.484.947	22.397.328.102	8.278.883.991

PT. BPR BHAKTI RIYADI
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Keterangan	31 Desember 2023	
	Jumlah Setiap komponen	Jumlah
	Rp	Rp
A. MODAL		
1. Modal Inti		
1.1. Modal disetor	3.015.000.000	3.015.000.000
1.2. Agio	-	-
1.3. Disagio -/-	-	-
1.4. Modal Sumbangan	-	-
1.5. Dana setoran modal	-	-
1.6. Cadangan umum	400.000.000	400.000.000
1.9. Laba ditahan	-	-
1.10. Laba tahun-tahun lalu	-	-
1.11. Rugi tahun-tahun lalu -/-	888.471.498	888.471.498
1.12. Laba tahun berjalan (50% setelah THP)	-	-
1.13. Rugi tahun berjalan -/-	(29.148.410)	(29.148.410)
1.14. Sub total	4.274.323.088	-
1.15. Goodwill		-
AYDA lebih dari setahun		-
kekurangan PPAP -/-		-
1.16. Jumlah Modal Inti		4.274.323.088
2. Modal Pelengkap		
2.1. Cadangan revaluasi aktiva tetap	-	-
2.2. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (maksimum 1,25% ATMR)	57.253.042	57.253.042
2.3. Modal kuasi/modal pinjaman	-	-
2.4. Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti)	-	-
2.5. Jumlah Modal Pelengkap	57.253.042	-
2.6. Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan (maksimum 100% dari modal inti)		57.253.042
3. Jumlah modal (1.13 + 2.6)		4.331.576.130
B. MODAL MINIMUM (12% X ATMR)	8.278.883.991	993.466.079
C. KELEBIHAN MODAL		3.338.110.051
D. RASIO MODAL = $\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$		52,32%

PT. BPR BHAKTI RIYADI
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Keterangan	Lancar Rp	Dalam Perhatian Khusus - Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
1. Aktiva Produktif						
a. Kredit yang diberikan	11.458.108.862	2.790.810.300	-	792.736.800	1.405.646.068	16.447.302.030
b. Surat-surat bernarga	-	-	-	-	-	-
c. Penempatan pada bank lain yang tidak dijamin LPS	-	-	-	-	-	-
Jumlah aktiva produktif	11.458.108.862	2.790.810.300	-	792.736.800	1.405.646.068	16.447.302.030
2. Jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan			50%	75%	100%	
3. Nilai agunan kred :			-	594.552.600	1.405.646.068	2.000.198.668
4. Kredit Back to Back	7.500.500	2.742.841.000	-	792.736.800	1.361.600.200	4.897.178.000
5. Dasar Perhitungan PPAPWD	11.450.608.362	47.969.300	-	-	44.045.868	7.500.500
6. Prosentase PPAPWD	0,5%	3%	-	50%	100%	11.542.623.530
7. Jumlah PPAPWD	57.253.042	1.439.079	-	-	44.045.868	102.737.989
8. Jumlah PPAPWD yang telah dibentuk						106.757.973
9. Jumlah lebih (kurang) pembentukan PPAP						4.019.984
10. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (2:1) x 100%						
11. Rasio PPAP terhadap PPAPWD (8:7) x 100%						12,16%
12. Prosentase kolektibilitas Kredit	69,67%	16,97%	0,00%	4,82%	8,55%	103,91%
13. Rasio NPL						100,00%
			-	792.736.800	1.361.600.200	13,37%
14. Rasio NPLs (Netto)						2.154.337.000
						13,10%